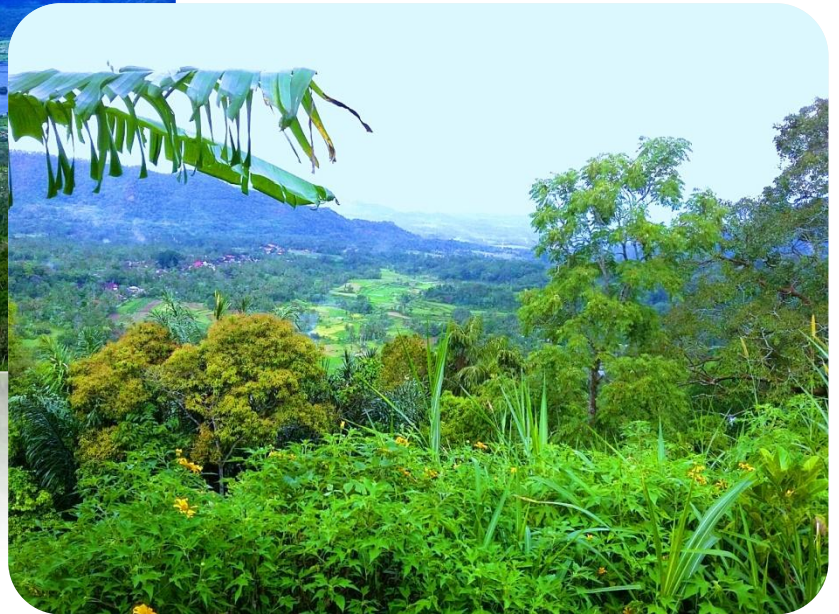


Nora Susilawati



SOSIOLOGI PEDESAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT akhirnya penulis dapat menulis buku teks. Buku Sosiologi Pedesaan ini dimaksudkan sebagai sarana bagi mahasiswa, dan pembaca yang berminat dengan realitas masyarakat di pedesaan. Bagi mahasiswa khususnya dapat lebih mudah memahami sosiologi dari kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Buku ini juga berguna untuk memahami prinsip-prinsip sosiologi yang diterapkan dalam memahami perilaku dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai problema di pedesaan, seperti kemiskinan, perubahan sosial, demokrasi, dan persoalan wanita di pedesaan.

Gagasan menulis buku ini adalah sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah sosiologi pedesaan, namun sebelum membaca buku ini sebaiknya memiliki pengetahuan dasar tentang konsep-konsep dasar sosiologi dan prinsip-prinsip sosiologi dalam konteks masyarakat desa.

Untuk menyempurnakan buku ini, penulis berharap agar kehadiran buku ini bermanfaat bagi pembaca terutama kalangan mahasiswa. Segala kritikan dan saran dari berbagai pihak atas apa yang tertuang dalam isi buku ini, penulis berterima kasih dan menerima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pihak yang telah memberikan kontribusi atas selesainya karya tulis ini, semoga semua kebaikan itu mendapat pahala dari Allah SWT.

Padang, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Konsep Sosiologi Pedesaan	1
Sejarah Sosiologi Pedesaan	1
Konsep dan Kajian Sosiologi Pedesaan	2
Pengertian Pedesaan.....	4
BAB 2 Masyarakat Desa dan Perkembangannya	7
Karakteristik Masyarakat Desa	8
Tipologi Masyarakat Desa	12
BAB 3 Pola Pemukiman di Desa	20
Ciri-Ciri Pemukiman	21
Pola Pemukiman Berdasarkan Tipe Desa	23
BAB 4 Pandangan Terhadap Petani	26
Pengertian Petani	27
Petani Sebagai Ekonomi Moral	30
Petani Rasional	32
BAB 5 Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa	34
1. Pengertian Stratifikasi Sosial	35
2. Pelapisan Masyarakat Desa	35
BAB 6 Lembaga-Lembaga Sosial di Desa	40
Pengertian Lembaga Sosial	41
Proses Terjadinya Lembaga Sosial	41
Tujuan dan Fungsi Lembaga Sosial	42
Lembaga-Lembaga Fungsional di Desa	43

BAB 7	Perubahan Sosial di Desa	48
	Perubahan Struktur	51
	Perubahan Budaya	53
	Perubahan Interaksi	54
BAB 8	Dinamika Kelembagaan Sosial di Desa	57
	Pengertian Kelembagaan	58
	Perubahan Kelembagaan	59
BAB 9	Pola Komunikasi di Desa	67
	Komunikadi sebagai Proses	68
	Jaringan Komunikasi Tradisional	68
	Jaringan Komunikasi Antar Lapisan Sosial	70
	Media Massa dan Bahasa Terus Terang	70
BAB 10	Kemiskinan di desa	74
	Konsep Kemiskinan	75
	Dimensi Kemiskinan	76
	Karakteristik Rumah Tngga Miskin	76
	Strategi Bertahan Hidup	78
BAB 11	Sistem Ekonomi Pasar dalam Masyarakat Desa	88
	Pengertian Pasar	89
	Mode Perilaku Ekonomi Masyarakat Desa	89
	Perilaku Timbal Balik	90
	Perilaku Berbagi	91
	Perilaku Tukar Menukar	91
BAB 12	Perempuan dalam Pembangunan Desa	95
	Konsep Gender	96
	Dampak Pembangunan terhadap Perempuan di Desa	98
	Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga di Desa	100

BAB 13	Demokrasi di Desa	105
	Memudarnya Otonomi Desa	106
	Pergeseran Peran Pemimpin di Desa	107
	Krisis Kepemimpinan di Desa	109
BAB 14	Strategi dan Model Pembangunan Masyarakat Desa	112
	Strategi Pembangunan Desa	113
	a. Perubahan Kelembagaan	113
	b. Industrialisasi di Pedesaan	114
	c. Pembangunan Masyarakat Terpadu	115
	d. Strategi Pusat Pertumbuhan	115
	e. Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda	116
	Model Pembangunan Masyarakat Desa	117
	a. Pendekatan Modernisasi	117
	b. <i>Community Development</i>	119
	c. Pendekatan Partisipatif	120
	d. Pemberdayaan Masyarakat	121
	e. Teori Pembangunan Desa	126
	f. Ketahanan Pangan Isu Pokok Abad ke 21	132
	DAFTAR PUSTAKA	137
	SENARAI	141

BAB I

KONSEP SOSIOLOGI PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam Bab I ini dibahas konsep-konsep dasar dalam kajian sosiologi pedesaan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab, antara lain : (1) sejarah munculnya studi sosiologi pedesaan ; (2) konsep dan kajian sosiologi pedesaan ; (3) pengertian tentang pedesaan.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi yang termuat dalam bab ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami tentang konsep-konsep dasar dan fokus kajian dalam studi sosiologi pedesaan, termasuk pengertian tentang pedesaan itu sendiri.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan fokus kajian dalam studi sosiologi pedesaan.

B. Materi

1. Sejarah Sosiologi Pedesaan

Sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang dari sosiologi itu sendiri. Secara historis, ia berkembang setelah segi-segi kemanusiaan dari pertanian mendapat perhatian di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1908.

Kajiannya bermula dari tulisan seorang pendeeta Kristen yang kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan di bagian utara Amerika. Lewat tulisan itu mereka memecahkan persoalan yang timbul di pedesaan akibat lahirnya industry, sehingga menyebabkan sebagian daerah pedesaan menjadi terbengkalai. Selain itu, berakhirnya masa penjelajahan daerah baru ke daerah Barat akhir abad 19. Pada tahun 1920-an, mata kuliah tentang persoalan kehidupan pedesaan mulai dikaji di berbagai universitas terutama di *The American Sociological Society*.

2. Konsep dan Kajian Sosiologi Pedesaan

Sosiologi Pedesaan dipahami sebagai penerapan teori-teori (umum) sosiologi dalam mempelajari masyarakat. Smith dan Zophf dalam Bahrein (1996) mengemukakan bahwa sosiologi pedesaan adalah sosiologi dari kehidupan pedesaan (*sociologi of rural life*). Studi ini adalah suatu pengetahuan yang sistematis sebagai hasil, penerapan metode ilmiah dalam upaya mempelajari masyarakat pedesaan, struktur dan organisasi sosialnya, sistem dasar masyarakat, dan proses perubahan sosial yang terjadi. Pendapat Smith dan Zophf didukung oleh Wiriattmaja dimana sosiologi pedesaan adalah ilmu yang mencoba mengkaji hubungan anggota masyarakat di dalam dan antara kelompok-kelompok di lingkungan pedesaan.

Sementara itu Rogers dkk dalam Bahrein (1996), melihat sosiologi pedesaan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku spasial (fenomena) masyarakat dalam *setting* pedesaan yang berhubungan dengan kelompoknya. Sosiologi pedesaan lebih sering dipakai dalam pemecahan masalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, studi ini lebih berorientasi pada proses perubahan sosial dan pemecahan masalah.

Tidak jauh berbeda jauh dengan Galeski (1972), sosiologi pedesaan disebutnya sebagai studi yang cenderung deskriptif, karena pedesaan merupakan daerah pertanian, terdapat pola-pola pertanian dan bertani, kehidupan keluarga di desa, tingkat kehidupan dan perkembangan penduduknya, struktur sosial yang berhubungan dengan pekerjaan, lembaga-lembaga pedesaan, adat dan kebiasaan penduduk dan sebagainya. Bahkan dewasa ini sosiologi pedesaan ada yang menganggap sama dengan sosiologi pertanian (*sociology of agriculture*). Namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu sosiologi pertanian cenderung memfokuskan upaya sosiologi bagi masyarakat desa yang menggeluti pertanian saja. Sedang sosiologi pedesaan menekankan studinya pada masyarakat pedesaan tanpa mempersoalkan hubungan mereka dengan usaha tani. Karena banyaknya masyarakat desa yang tidak lagi secara langsung terlibat pada sektor primer, tetapi sudah berkembang ke sektor sekunder.

3. Pengertian Pedesaan

Kata “pedesaan” sepadan dengan kata *rural* dalam bahasa Inggris. Dalam pemakaiannya sehari-hari definisi dari perkataan tersebut sulit dikemukakan secara utuh, karena konsep pedesaan berbeda dari satu kawasan ke kawasan lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain.

Dari segi geografis, Bintarto (1989) mengemukakan bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Paul H. Landis dalam Jefta (1995) mencoba memberikan batasan pengertian pedesaan sebagai berikut :

1. Untuk maksud statistik, pedesaan adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang
2. Dari kajian psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan masyarakatnya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi

3. Dari kajian ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pusat perhatiannya pada bidang perhatian.

Di Indonesia, batasan Landis kurang tepat dipakai, sebab jumlah penduduk satu desa di Jawa misalnya melebihi 11.445 orang, tetapi keadaannya masih bersifat pedesaan. Sebaliknya, kondisi dikota-kota besarpun mencirikan sifat-sifat pedesaan.

C. Rangkuman

1. Sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang dari sosiologi yang berkembang setelah adanya perhatian masyarakat di bidang pertanian
2. Sosiologi pedesaan adalah suatu studi yang mempelajari kehidupan masyarakat dipedesaan, yaitu mengenai perilaku, struktur sosial, organisasi social, lembaga, adt, kebiasaan dan perubahan social serta bagaimana memecahkan persoalan di pedesaan.
3. Fokus kajian sosiologi pedesaan adalah mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masyarakat pedesaan yaitu hubungan anggota masyarakat didalam dan diantara kelompok di lingkungan pedesaan.
4. Pedesaan memiliki banyak pengertian, karena dapat di kaji dari berbagai aspek, yaitu : a) Aspek geografis, diartikan sebagai perpaduan kegiatan manusia dengan lingkungannya, b) Aspek psikologis social, dilihat pada derajat intimitas pergaulan masyarakat, c) Segi jumlah penduduk kurang

dari 2.500 orang, d) Aspek ekonomi dilihat pada perhatian masyarakat di bidang pertanian.

D. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan berikut ini, apabila anda belum dapat menjawabnya ulangi lagi mempelajari bab I

1. Jelaskan sejarah lahirnya sosiologi pedesaan !
2. Jelaskan konsep dan fokus kajian sosiologi pedesaan !
3. Jelaskan pengertian pedesaan menurut P. H Landis, dan bagaimana pendapat ahli tersebut dalam konteks masyarakat desa di Indonesia !

BAB II

MASYARAKAT DESA DAN PERKEMBANGANYA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada bab II ini menguraikan tentang masyarakat desa dan perkembangannya yang terdiri dari : 1) karekteristik masyarakat desa yang meliputi ciri-ciri, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kemajuan atau ide-ide baru yang masuk ke desa, 2) Tipologi masyarakat desa yang dilihat dari segi kegiatan pokok memenuhi kebutuhan hidup , pola pemukiman, perkembangan amasyarakat dan tipologi berdasarkan tipe komunitas desa di Indonesia, yaitu konsep daerah hokum (Van Vollenhoven) adat, tipe sosio cultural (Geertz dan Koentjaraningrat) dan jenis mata pencaharian hidup (Ave).

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan setelah membaca bab ini mahasiswa dapat memahami tentang karakteristik masyarakat di pedesaan dan tipologi masyrakat desa baik secara umum maupun tipologi komunitas desa di Indonesia khususnya.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik masyarakat desa, mengidentifikasi dan membedakan berbagai tipe masyarakat di pedesaan termasuk Indonesia.

B. Materi

1. Karakteristik Masyarakat Desa

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren, dalam Jefta (1995) yaitu :

- a. Mereka memiliki sifat yang homogeny dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan tingkah laku.
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, misalnya adanya keterikatan, anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
- d. Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak.

Apa yang dikemukakan di atas, tidak berarti berlaku di setiap desa karena bisa saja salah satu atau beberapa cirri yang sudah ada tidak kelihatan lagi akibat terjadinya perkembangan dalam masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya Rogers dkk (1969) juga mengemukakan hal yang hampir sama tentang masyarakat desa, namun ia lebih menjelaskan dari segi petani, yaitu

a. Adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani dengan yang lain. Hal ini bisa terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, sesama anggota komunitas saling berebut untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Misalnya tanah, adalah sumber produksi usaha tani yang terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah disertai pula dengan pekerjaan di bidang pertanian tidak menjamin sehingga petani berusaha di luar sektor pertanian.

b. Pandangan yang sempit dikalangan petani

Pandangan yang sempit menyebabkan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya Jawa, mengungkapkan bahwa "*lakune*

wong urip gumantung nasibe dewe-dewe” (orang hidup itu tergantung nasibnya sendiri-sendiri)

c. Ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah

Hubungan antara petani dengan pemerintah cenderung kurang harmonis bila pemerintah memperlihatkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Dengan demikian tidak adanya keterbukaan dan kebebasan menentukan pilihan menimbulkan rasa curiga terhadap pemerintah.

d. Familisme

Adanya rasa kekeluargaan dan keakraban diantara orang-orang yang memiliki tali kekerabatan

e. Rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru

Kondisi ini ada dalam masyarakat desa yang relative belum berkembang disebabkan oleh sumberdaya alam yang cukup menghidupi mereka. Masyarakat baru menerima ide-ide baru kalau sumberdaya alamnya tidak mendukung lagi atau mulai berkurang.

f. Fatalisme

Sikap ini tercermin pada pandangan seseorang yang menganggap bahwa keberhasilan bukanlah hasil kerja keras seseorang, tetapi berada diluar dirinya (supernatural)

- g. Keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan
Dalam masyarakat desa terutama mereka yang rentan terhadap kemiskinan, cenderung ditemukan keinginan yang sangat rendah baik dibidang pendidikan maupun jenis pekerjaan lain (terutama anak-anak dan wanita)
- h. Kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri untuk mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan. Keadaan ini disebabkan karena petani selalu diliputi oleh situasi yang tidak menentu akibat tergantungnya mereka dengan alam. Misalnya nelayan, bila mendapatkan hasil yang berlebih, mereka cenderung membeli barang kebutuhan rumah tangga seperti elektronik untuk dinikmati dalam “semusim”. Bila musim berikutnya kurang beruntung, apa yang telah dibeli, dijual kembali dengan harga yang lebih murah.
- i. Pandangan yang terbatas dengan dunia luar
Hal ini diketahui pada kemampuan masyarakat tersebut dalam menyerap sesuatu yang datang dari luar, misalnya pesan-pesan pembangunan yang disampaikan apakah dapat diterima, dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat tersebut.

j. Memiliki derajat empati yang rendah

Rendahnya empati yang disebabkan oleh jarak sosio psikologis maupun pengetahuan yang terbatas dari masyarakat lain yang sudah lebih maju.

Beberapa kecenderungan karakteristik-karakteristik diatas, dikemukakan secara umum, namun tidak semua kecenderungan ini ada pada setiap masyarakat desa sebab tergantung pada seberapa jauh tingkat perubahan (kemajua) yang telah dicapai oleh masyarakat desa.

2. Tipologi Masyarakat Desa

Tipologi tentang masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi (Jefta, 1995), yaitu :

a. Dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian
- Desa industry, dimana pandangan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industry kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut
- Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha dibidang perikanan (pantai, laut dan darat)

b. Dari segi pola pemukiman

- *Farm village type*, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang disekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat, hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern.
- *Nebulous farm village type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah lading mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektifitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat.
- *Arrengeed isolated farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpaidi Negara-negara Barat.

Tradisi disini kurang kuat, individualistis lebih menonjol, lebih berorientasi pada bidang perdagangan.

- *Pure isolated farm village type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah lading mereka masing-masing. Tipe ini kebanyakan dinegara-negara Barat. Tradisi kurang kuat, individualistis menonjol dan juga berorientasi perdagangan.

c. Dari segi perkembangan masyarakat (Bahrein, 1996)

- Desa tradisional (pradesa)
Tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing. Seluruh kehidupannya termasuk teknologi bercocok tanam, cara-cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara memasak makanan dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya. Pembagian kerja dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada pekerjaan tertentu yang hanya boleh dikerjakan oleh wanita saja sedang laki-laki tidak, demikian pula sebaliknya
- Desa swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi yang relative statis tradisional. Masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Kehidupan

masyarakat sangat tergantung dengan alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik. Susunan kelas dalam masyarakat masih bersifat vertical dan statis serta kedudukan seseorang dinilai menurut keturunan dan luasnya kepemilikan tanah.

- Desa swakarya (desa peralihan)

Keadaan desa sudah dimulai disentuh oleh pembaharuan. Masyarakat sudah tidak tergantung lagi dengan pimpinan. Kaya, jasa dan keterampilan serta luasnya kepemilikan tanah sudah menjadi ukuran kedudukan seseorang. Mobilitas social baik secara vertical maupun horizontal sudah mulai ada.

- Desa swasembada

Masyarakat telah maju karena sudah mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma social selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Selain itu, sudah ada pengusaha yang berani mengambil resiko dalam menanam modal.

Sementara itu, Marzali juga mengemukakan tipologi komunitas desa di Indonesia, sebagai berikut :

a. Konsep “Daerah Hukum Adat”

Van Vollehaven membagi dua kriteria pokok, yaitu 1) “kultur” (aturan-aturan adat) merupakan aturan-aturan pribumi menyangkut kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan desa mengenai tanah, kehidupan ekonomi rakyat dan hubungan kekeluargaan, 2) lingkungan geografis

Konsep daerah hukum adat sama dengan culture area oleh Frans Boas yang mengandung subjektifitas yang kuat, sehingga klasifikasinya bervariasi sesuai dengan penekanan unsur-unsur budaya. Bagi yang menekankan unsur budaya yang utama adalah ekonomi, culture areanya akan berbeda dengan yang menekankan pada aspek sikap psikologis, *foklore* atau organisasi

b. Konsep ”tipe sosiokultural”

Koentjaraningrat membagi tipe ini menjadi empat, yaitu *pertama*, masyarakat yang hidup di desa-desa terpencil, struktur social sangat sederhana, berkebun ubi dan keladi yang

dikombinasikan berburu dan meramu. Tidak pernah mendapat pengaruh perunggu, Hindu dan Islam, tetapi dipengaruhi oleh Kristen, misalnya Nias, Mentawai dan Irian Jaya. *Kedua*, masyarakat hidup berhubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun colonial Belanda, struktur social sudah agak kompleks, bercocok tanam padi di ladang dan di sawah. Dipengaruhi oleh Kristen, misalnya Batak, Dayak, Minahasa, Flores dan Ambon. *Ketiga*, masyarakat desa yang hidup bercocok tanam padi sawah ladang, struktur social sudah agak kompleks, punya hubungan dengan kota-kota kecil yang pernah menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda dan mendapat pengaruh yang kuat oleh Islam, misalnya Aceh, Minangkabau dan Makassar. *Keempat*, bercocok tanam padi di sawah, struktur social agak kompleks, mempunyai hubungan dengan kota-kota bekas pusat kerajaan pribumi dan administrasi colonial Belanda. Dipengaruhi oleh Hindu, Islam dan colonial Belanda, kecuali Bali yang tidak mengalami pengaruh Islam, misalnya masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. *Kelima*, masyarakat perkotaan yang berperan sebagai pusat pemerintahan, kegiatan sector industry dan perdagangan masih lemah. *Keenam*, yaitu masyarakat dan kebudayaan kota metropolitan dimana sector industry dan perdagangan sudah maju.

c. Konsep “jenis mata pencaharian hidup”

Ave meletakkan aspek produksi atau cara memproduksi dalam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia. Ia mengutamakan aspek ini pada “mata pencaharian hidup” kemudian ditambah dengan mata pencaharian pelengkap dan peralatan teknologi. Mulai dari mengumpulkan makanan, mencari ikan, memelihara ternak, pertanian sampai pada industry. Namun klasifikasi Ave sulit dipahami karena bisa saja satu suku bangsa mempunyai beberapa jenis cara memproduksi.

C. Rangkuman

1. Ada beberapa karakteristik yang mencirikan tentang masyarakat desa, namun ciri-ciri tersebut tidak berlaku bagi setiap desa, karena masyarakat selalu mengalami perkembangan dan perubahan
2. Tipologi masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu : a) segi kegiatan pokok memenuhi kebutuhan hidup, b) segi pola pemukiman, dan c) segi perkembangan desa.
3. Tipologi komunitas desa di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagaimana ditulis oleh Marzali, yaitu a) konsep daerah hukum adat, b) konsep sosiokultural, dan c) konsep jenis mata pencaharian hidup

D. Pertanyaan

1. Jelaskanlah bagaimana karakteristik masyarakat desa, berikan penjelasan Anda dalam konteks masyarakat petani seperti yang dikemukakan oleh Rogers (1969) !
2. Jelaskan bagaimana tipologi masyarakat desa yang ditinjau dari segi kegiatan pokok memenuhi kebutuhan hidupnya, berikan penjelasan anda beserta contohnya dalam konteks pedesaan di Indonesia !
3. Bandingkan komunitas desa di Indonesia beserta contohnya dari segi tipe sosiokultural menurut Koentjaraningrat dengan Geertz !

BAB III

POLA PEMUKIMAN DI PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Pada bab III, ini diuraikan materi mengenai ciri-ciri atau keadaan pemukiman yang ada disekitar desa dan kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai pola pemukiman masyarakat desa berdasarkan tipe desa berdasarkan tipe desa yang terdiri dari tipe desa Banjar, tipe desa Eropa, dan tipe yang mengikuti lahan usaha tani.

2. Manfaat Perkuliahan

Manfaat yang diperoleh dari materi pada bab ini adalah mahasiswa dapat memahami tentang ciri-ciri atau keadaan pemukiman yang ada di sekitar desa dan pola pemukiman yang menggambarkan bagaimana penyebaran perumahan atau lahan usaha tani di pemukiman tersebut.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ciri-ciri pemukiman termasuk pola pemukiman yang ada di pedesaan umumnya dan Indonesia khususnya.

B. Materi

1. Ciri-ciri Pemukiman

Pemukiman dapat dipahami sebagai suatu daerah yang dijadikan oleh sekelompok orang sebagai tempat tinggal mereka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemukiman mempunyai beragam bentuk atau pola sesuai dengan kondisi lingkungan, system social yang berlaku dan kebutuhan. Dengan kata lain, pola pemukiman itu ditentukan oleh karakteristik yang khas, seperti factor geografis, lembah, bukit, pinggir sungai, gurun, padang rumput, di pinggir laut dan sebagainya. Faktor social, seperti system pertanian yang berpindah-pindah, kekeluargaan dan system kepercayaan yang dianut oleh para pemukim.

Pada umumnya suatu pemukiman memiliki beberapa cirri atau aspek tertentu yang memungkinkan berdiri sebagai suatu pemukiman yang utuh disebut desa. Ciri-ciri aspek tersebut adalah : (Bahrein, 1990)

- Suatu desa, biasanya terdiri dari sekelompok rumah, sejumlah lumbung padi, gudang-gudang atau bangunan lain yang dipakai bersama, disamping lahan yang dimiliki secara sendiri-sendiri atau dimiliki dan dipai bersama-sama
- Disekitar desa biasanya terdapat lahan pekarangan yang diusahakan dan mungkin dipakai sebagai lahan usaha untuk mendukung kehidupan atau kebutuhan sehari-hari

- Lahan usaha tani umumnya terdapat jauh atau terpisah di pusat pemukiman
- Sering pula disela-sela lahan usaha tani terdapat padang penggembalaan
- Batas-batas alami satu desa dengan desa-desa lain disekitarnya terdapat hutan semak belukar yang sering pula merupakan sumber energi bagi pemukim desa

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, suatu pemukiman baru disebut desa, bila :

- Disamping jumlah keluarga (orang), perlu ada suatu lokasi (ruang) tertentu yang dapat dipakai penduduk untuk mendirikan bangunan perumahan, atau bangunan lain untuk tempat tinggal bagi anggota keluarganya.
- Suatu desa harus mempunyai lahan desa yang dapat dikuasai atau dipakai secara legal oleh para pemukim untuk mengembangkan usaha tani (bertani) dan beternak sebagai sumber mata pencaharian hidup bagi mereka.
- Suatu pemukiman akan segera menjadi desa bila sumber air cukup tersedia bagi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk desa, pengembangan usaha tani dan peternakan termasuk pengembangan ternak ikan air tawar, udang dan sebagainya.

- Suatu desa berkembang bila pemukiman tersebut mempunyai hutan, semak belukar yang cukup sebagai sumber kebutuhan energi panas, terutama kayu api untuk kebutuhan dapur atau bahan bakar pengganti kayu yang bersumber di hutan tersebut.

2. Pola Pemukiman Berdasarkan Tipe Desa

Menurut Smith dan Zophf dalam Jefta (1995), ada beberapa variasi tipe desa yaitu :

- a. Tipe desa banjar (*line villages*), yaitu desa yang rumah-rumahnya ditata atau dibangun berbaris lurus mengikuti suatu garis tertentu menyilang atau menyusur pinggir sungai, kanal atau anak sungai. Lahan untuk pengembangan usaha tani dan padang penggembalaan ternak pada umumnya di belakang lokasi pemukiman. Sungai biasanya dijadikan sebagai prasarana untuk lalu lintas atau transportasi ekonomi dan social, serta terdapat saluran komunikasi dengan diluar pedesaan.
- b. Tipe desa Eropa, terutama orang-orang Slavia. Desa ini cenderung menonjolkan ciri khas budaya kelompok etnis setempat. Desa-desa orang Slavia berbentuk desa yang bundar atau melingkar. Hampir sama dengan tipe desa dari banyak suku di berbagai bagian Afrika.
- c. Tipe pemukiman mengikuti lahan usaha tani. Bila lahan usaha tani tiap keluarga itu luas, sebagaimana yang terdapat di Amerika Serikat. Jarak

antara satu rumah tempat tinggal (keluarga) dengan rumah berikutnya menjadi besar yang tidak memungkinkan suatu komunikasi (tatap muka) intensif atau lebih akrab. Untuk memenuhi sebahagian kebutuhan atau suplai barang, seringkali mereka harus menempuh jarak yang jauh ke kota-kota atau pusat-pusat perbelanjaan yang banyak bermunculan di pinggiran kota.

C. Rangkuman

1. Pemukiman adalah suatu daerah yang dijadikan oleh sekelompok orang sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Ciri-ciri pemukiman di desa terdiri dari : a) terdapatnya lumbung padi, gudang dan lahan, b) terdapatnya lahan pekarangan dan lahan untuk mata pencaharian, c) lahan usaha tani terisah dari pemukiman, d) dibatasi oleh semak belukar dan hutang yang juga dimanfaatkan untuk eneergi panas dan bahan bakar, dan e) terdapatnya lokasi untuk tempat tinggal.
3. Pola pemukiman desa terdiri dari beberapa tipe, yaitu : a) tipe desa Banjar , b) tipe desa Eropa, dan c) tipe desa yang mengikuti lahan usaha tani.

D. Pertanyaan

1. Jelaskan beberapa cirri suatu pemukiman yang disebut sebagai pemukiman di desa dan berikan suatu ilustrasi ciri-ciri tersebut pada pemukiman pedesaan di Indonesia ?
2. Sebutkan dan jelaskan 3 tipe pemukiman di desa dan berikan contohnya masing-masing ?
3. Mengapa di pedesaan terdapat suatu lahan usaha tani yang digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya bagi penduduk desa ?

BAB IV

KONSEP DAN PANDANGAN TERHADAP PETANI

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada bab ini menguraikan tentang konsep atau pengertian petani dari beberapa ahli dan pandangan terhadap petani dari segi ekonomi moral (Scott) dan petani rasional/ekonomi politik (Popkin)

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dan beberapa pengertian tentang petani di dalam masyarakat serta dapat membedakan konsep petani dalam artian *peasant* dan *farmer*. Selanjutnya memahami petani dari perspektif ekonomi moral dan bedanya dengan ekonomi politik/rasional.

3. Kompetensi Dasar

Adapun tujuan dari materi pada bab ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian petani dalam arti *peasant* dan *farmer*, dan mengkaji petani dari perspektif ekonomi moral dan ekonomi politik/rasional

B. Materi

1. Pengertian Petani

Petani (*peasant*) merupakan salah satu golongan masyarakat pedesaan di negara berkembang yang memiliki makna tersendiri untuk memahami bagaimana wujud petani itu sebenarnya. Pengertian tentang konsep dan pemahaman terhadap petani ditafsirkan orang berbeda-beda, karena ia merupakan suatu *tipe ideal* yang selalu menjadi perdebatan yang tidak henti-hentinya.

Pengertian petani dapat dibagi pada :

- a. Menurut Gillian Hart, Robert Hefner dan Paul Alexander menggunakan istilah *peasant* kepada semua penduduk pedesaan secara umum, tidak peduli apapun pekerjaan mereka.
- b. Dari beberapa ahli pertanian pedesaan di Indonesia dan Malaysia menggunakan istilah *peasant* adalah petani. Jadi menurut mereka *peasant* tidak mencakup seluruh penduduk pedesaan, tetapi hanya terbatas pada penduduk pedesaan yang bekerja. Konsep ini dapat ditemukan pada karangan Scott dan Wan Hasyim.
- c. Wolf dan Ellis pengikutnya menjelaskan bahwa konsep *peasant* mengacu pada golongan yang lebih terbatas lagi, yaitu hanya petani yang memiliki lahan pertanian, menggarap lahan sendiri untuk

menghasilkan produk untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual. Di Indonesia disebut dengan istilah petani penggarap.

Marzali menggunakan konsep petani dengan peisan (peasant). Menurut Marzali, pengertian-pengertian tersebut tidak dapat dioperasionalkan di Indonesia, khususnya di luar Jawa, karena penduduk pedesaan Indonesia ada yang bekerja sebagai pedagang, buruh industry kecil dan ABRI. Jika sebagai petani digolongkan kepada petani yang mana karena ada beberapa jenis petani, yaitu petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani.

Dalam pandangan evolusioner, peisan dianggap sebagai suatu masyarakat yang berada di antara bentuk masyarakat primitif dan bentuk masyarakat modern. Masyarakat primitif adalah satu kehidupan yang paling awal dalam perkembangan peradapan manusia dimana kelompok-kelompok keluarga berlatih hidup mengembara sambil berburu dan meramu dalam satu kawasan yang luas. Dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan sistem sosialnya mereka masih sangat sederhana, misalnya orang Kubu di Sumatera bagian tengah, Orang Tigutil di Halmahera dan Orang Kung Bushman di Afrika Selatan.

Masyarakat peisan dipandang sebagai petani yang hidup dari mengolah tanah dan mengelompok tinggal di pedesaan. Mereka telah

meninggalkan cara hidup primitif, namun belum masuk ke taraf hidup urban modern. Masyarakat ini dibagi lagi berdasarkan tingkat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan sistem sosialnya, yaitu petani yang masih hidup dengan cara berburu dan meramu (petani primitif). Peralatan pertanian yang digunakan sangat sederhana, seperti parang dan tugal, misalnya masyarakat Dayak, Mentawai dan orang Yanomano. Kemudian petani yang menjalankan usaha pertanian modern, seperti traktor dan huller, mereka bertani untuk mendapatkan keuntungan dan memperbesar skala dan bidang usahanya (*farmer* di Amerika, Eropa dan Australia).

Posisi petani berada diantara masyarakat primitif dan masyarakat modern sebagai masyarakat yang menetap dalam komunitas-komunitas pedesaan dan dari segi *mode of production*, mata pencaharian dan teknologinya berada pada tahap transisi antara petani primitif dan petani farmer.

Sementara itu, untuk membedakan antara petani primitif dan petani peisan digunakan kriteris hubungan dengan kota. Petani peisan hidup berhubungan dengan pusat-pusat kota, pasar dan merupakan bagian dari budaya kota tersebut. Sedang petani primitif hidup relatif terisolasi dan tidak berhubungan secara social, budaya, ekonomi dan politik dengan kota (masyarakat terasing). Untuk petani peisan dan petani farmer, keduanya

secara social, politik, ekonomi, dan budaya, mereka sama-sama berhubungan dengan kota, namun sifat usaha pertaniannya berbeda. Petani *peasant* adalah petani yang masih subsistem sedang petani *farmer* adalah petani komersial.

Lain halnya dengan Firth, dengan pendekatan holistik ia memfokuskan kajiannya tentang *peasant* pada sistem ekonominya yaitu suatu sistem ekonomi dengan teknologi dan keterampilan sederhana, sistem pembagian kerja sederhana dan hubungan dengan pasar terbatas, non-kapitalistik, skala produksi kecil dan hubungan produksi bersifat personal. Perhatian terhadap aspek sosial dan keagamaan lebih diutamakan pada aspek materi. Menurut Firth, *peasant* adalah orang desa atau masyarakat desa, apakah ia petani, nelayan, pengrajin atau merangkap ketiganya selama ia berperan secara wajar dan pantas dalam cara hidup *peasantry*.

2. Pandangan Terhadap Petani

a. Ekonomi Moral Petani

James. C. Scott menekankan kajiannya pada komunitas petani. Para petani yang tidak punya makanan banyak dikatakan kaya dengan kehidupan spiritual. Struktur kehidupan yang demikian seperti orang yang terendam dalam air sampai ke bibirnya dan ombak kecil atau tiupan angin akan menyebabkan tenggelamnya petani. Keadaan inilah yang menyebabkan petani tidak berani mengambil resiko terlalu banyak

sehingga memaksa mereka untuk bergotong royong, bernilai kolektif serta saling menolong, tidak ada penanaman modal dan curiga dengan dunia luar. Perluasan kekuasaan Negara dan pajak-pajak adalah beban baru bagi petani. Munculnya kapitalisme dan komersialisasi hasil-hasil agrarian dirasakan sebagai ancaman bagi petani. Reaksi terhadap perubahan tersebut oleh ekonomi moral dilihat sebagai sumber mengapa petani ikut dalam gerakan pemberontakan dan gerakan-gerakan revolusioner.

Persoalan pemerintah adalah hasil dari pengertian hak moral para petani untuk dapat hidup dalam keadaan subsistem yang kaya tidak berani memaksa memamerkan kekayaan karena keamanan dan mereka dengan selamatan dan makanan lain. Pemilikan atas tanah juga menjadi unsur desa dan dicari bentuk ekonomi yang dapat membagi secara rata resiko hidup. Jawaban terhadap perkembangan kapitalis adalah *involusi* pertanian dengan mengintensifkan tenaga kerja, membagi-bagi tanah dalam keadaan jumlah penduduk meningkat dan sebagainya.

Kedudukan para pengusaha desa tradisional atau tuan tanah adalah moral dan atas dasar legitimasi. Persoalan keadilan dan nilai-nilai penting sekali untuk wibawa para elit desa. Dinamika desa dalam arti jawaban pribadi atas perubahan sangat rendah menurut teori ekonomi moral.

b. Ekonomi Politik / Rasional

Berbeda dengan Scott, Samuel Popkin berpendapat bahwa bukan kolektifitas penghuni desa yang berperan pada jawaban terhadap perubahan, akan tetapi pribadi petani sendiri dan peranan lembaga desa bagi hidup pribadi petani.

Popkin menguji pengambilan resiko dan spekulasi, penanaman modal oleh petani dan bagaimana sebenarnya hubungan patron- klien di desa dan hubungan tawar menawar antara berbagai golongan dalam desa. Keputusan-keputusan petani dapat dimengerti mengapa ada nilai-nilai yang diterima petani dan ada yang ditolak. Para petani agak segan terhadap penanaman modal, namun hal ini dilakukan khususnya untuk menjamin hari tua. Penanaman modal ini bisa berupa ternak, tanah, pupuk dan sebagainya untuk jangka panjang.

Hubungan patron-klien antara penduduk desa juga dilihat sebagai penanaman modal dan mencari jaminan-jaminan bagi petani terhadap keadaan. Menanam modal dalam hubungan social, mereka memilihnya dalam keluarga baru setelah itu memikirkan desa secara umum (orang desa lebih individualistis). Hubungan patron-klien karena sebagai hubungan kelas. Patron adalah elit penguasa desa memonopoli sumber ekonomi dan eksploitatif bukan berdasarkan moral.

C. Rangkuman

1. Petani merupakan suatu tipe ideal yang selalu menjadi diperdebatkan oleh ahli pedesaan, sehingga memiliki pengertian yang bermacam-macam. Satu sisi ada yang menganggap bahwa petani adalah semua penduduk yang berada di pedesaan, namun di sisi lain hanya terbatas pada mata pencahariannya sebagai petani saja. Di Indonesia, petanipun harus dilihat pula apakah ia petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani.
2. Ada dua pandangandair Scott dan Popkin dalam melihat tentang petani terhadap perubahan, yaitu pertama, dari perpektif ekonomi moral (Scott) menekankan pada kolektifitas komunitas petani , kedua dari perspektif ekonomi rasional lebih menekankan pada pribadi petani dan lembaga desa dalam kehidupan petani itu sendiri.

D. Pertanyaan

1. Bandingkanlan pengertian petani menurut pendapat Giliian Hart dan kawan-kawan dengan Wolf dan Ellis ?
2. Bagaimana bedanya antara petani dalam arti *peasant* dan *farmer* ?
3. Konsep apa yang digunakan oleh Marzali tentang petani dan bagaimana pendapatnya tentang konsep tersebut dalam masyarakat di Indonesia ?
4. Jelaskan posisi petani dalam komunitas pedesaan ?
5. Jelaskan bagaimana perbedaan pandangan petani dalam kajian Scott dan Popkin ?

BAB V

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT DESA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi ini berisi tentang stratifikasi atau pelapisan social dalam masyarakat desa, terdiri dari sub-sub bab yaitu : a) pengertian stratifikasi social dan b) pelapisan social di pedesaan.

2. Manfaat Perkuliahan

Diharapkan mahasiswa memahami tentang pengertian stratifikasi sosial dan pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat desa.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian stratifikasi social, dan dapat mengidentifikasi hal0hal yang menentukan berlapisannya masyarakat di pedesaan serta mengklasifikasikan golongan masyarakat desa sesuai dengan stratanya.

B. Materi

1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi social atau pelapisan social adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis) yang wujudnya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah

Sistem pelapisan tersebut merupakan cirri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Soejono Soekanto (1982) mengatakan bahawa barang siapa yang memiliki susatu barang berharga, misalnya barang, uang, ternak dan sebagainya dalam jumlah yang sangat banyak dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas. Bagi mereka yang hanya memiliki sedikit sesuatu yang berharga tersebut dianggap tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

a. Pelapisan Masyarakat Desa

Umumnya di Indonesia, kebanyakan penduduknya memperoleh penghidupan dalam bidang pertanian, maka dengan sendirinya tanah merupakan sumber usaha produksi pertanian. Untuk kebanyakan desa-desa di Jawa seperti di Jawa Timur, tanah sebagai sumber kekayaan terpenting bagi masyarakat petani akan menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat.

Dari penelitian Singarimbun dan Penny (1984) menjelaskan bahwa struktur luas tanah untuk pertanian adalah sangat sempit di dua daerah penelitian yaitu Klaten dan Surakarta. Sebagian besar penduduk berada di jenjang terbawah memiliki bagian tanah yang sempit, sedang sebagian kecil dari mereka yang memiliki sumber produksi pertanian yang lebih luas.

Pada pertanian modern, berdampak pada hubungan sosial antara masyarakat desa, dimana hubungan tidak menempatkan hubungan bapak anak buah, tetapi kembali menjadi hubungan majikan dengan buruh. Hubungan yang sama juga nampak pada masyarakat nelayan, dimana orang yang memiliki alat-alat penangkapan ikan (jaring, pukat dan perahu mesin) menempati lapisan atas dalam masyarakat nelayan tersebut. Disulawesi, para pemilik peralatan penangkapan disebut dengan para "*punggawa*" dan anak buahnya disebut para "*sawi*".

Untuk desa-desa industri kecil atau kerajinan, mereka memiliki modal besar serta alat-alat produksi menempati lapisan atas dalam masyarakat tersebut dan yang tidak berada pada lapisan bawah.

Menurut Prof. Soedjito dalam Jefta (1995), melihat stratifikasi sosial di desa berdasarkan atas kemampuan ekonomi yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu “

- Lapisan I : Lapisan elit yang semakin memiliki cadangan pangan juga memiliki modal cadangan pengembangan usaha
- Lapisan II : mereka hanya memiliki cadangan pangan saja
- Lapisan III : mereka yang tidak memiliki modal cadangan pangan dan pengembangan usaha

Rogers, dkk (1987) membagi masyarakat (para adopter) ke dalam innovator adopter awal, mayoritas (awal dan akhir) dan *laggard* (golongan masyarakat lapisan bawah). Sedang Calson (1981) mengemukakan bahwa struktur teratas diduduki oleh warga desa kaya, terdiri dari orang-orang seperti pemilik perusahaan perkayuan besar, pengusaha tambang, pengusaha bisnis kota kecil, pemilik lahan usaha tani besar, dokter, pengacara dan profesional lain lulus perguruan tinggi.

Strata kedua adalah para guru di pedesaan, pemilik lahan usaha tani dalam ukuran menengah, manager perusahaan besar di pedesaan, para operator tempat-tempat rekreasi dan orang-orang berpenghasilan lumayan termasuk ke dalam kelas menengah. Mereka ini sering disebut juga dengan buruh berdasi (*white collar class*). Sedang lapisan paling bawah adalah orang-orang yang bekerja sebagai buruh perusahaan atau pabrik industry di desa, pelayan toko, orang yang bekerja tanpa memerlukan pendidikan tinggi dan bergaji sekedarnya, para buruh tenaga kasar, orang

yang berpenghasilan rendah. Orang-orang ini sering disebut sebagai orang yang berseragam biru (*blue collar class*).

C. Rangkuman

1. Stratifikasi atau pelapisan sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas- kelas secara bertingkat (hierarkis) yang wujudnya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah
2. Stratifikasi social dalam masyarakat ditentukan oleh adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat tersebut yaitu berupa tanah, uang, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya
3. Dalam masyarakat desa, pelapisan social ditentukan oleh apa yang dihargai untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok, misalnya di Indonesia dimana kebanyakan masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, tanah adalah sumber kekayaan bagi petani yang akan menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat.
4. Untuk desa industri kecil, kedudukan seseorang ditentukan oleh modal besar dan alat-alat produksi yang dimiliki.

D. Pertanyaan

1. Jelaskanlah pengertian dari stratifikasi sosial ?
2. Dalam masyarakat, sesuatu yang dianggap berharga menentukan terjadinya pelapisan social dalam masyarakat. Sebutkan dan jelaskan apa-apa saja yang menentukan pelapisan social dalam masyarakat desa ?
3. Bandingkan faktor yang menentukan kedudukan seseorang di desa pertanian dan desa industri kecil serta berikanlah contohnya masing-masing !

BAB VI
LEMBAGA-LEMBAGA FUNGSIONAL
DALAM MASYARAKAT DESA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Bab VI ini menguraikan materi tentang lembaga-lembaga yang berfungsi (fungsional) dalam masyarakat desa, terdiri dari : a) pengertian lembaga sosial, b) proses terjadinya lembaga sosial, c) tujuan dan fungsi lembaga sosial, dan lembaga-lembaga fungsional di desa (lembaga kepemimpinan, lembaga keluarga, lembaga ketetangaan dan lembaga keagamaan).

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami pengertian lembaga sosial, proses, tujuan dan fungsi lembaga sosial serta lembaga-lembaga fungsional yang ada di pedesaan

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan lembaga-lembaga fungsional yang ada di desa sebagai wujud lembaga sosial dalam masyarakat desa.

B. Materi

1. Pengertian Lembaga Sosial

Dalam masyarakat desa selalu ditemukan beberapa lembaga yang mempunyai fungsi mengatur sikap dan tingkah laku para warganya sekaligus merupakan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan interaksi dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Menurut Roucek dan Warren dalam Jefta (1995), lembaga sosial adalah pola aktifitas yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lain halnya dengan Summer mengatakan bahwa lembaga sosial adalah adat kebiasaan yang sistematis dan sederhana. Sementara itu Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi dalam Soekanto (1982) menjelaskan lembaga sosial merupakan fungsi dari perwujudan pola-pola kebudayaan meliputi tindakan, ide-ide, sikap-sikap dan kelengkapan kebudayaan yang selalu memiliki keajegan dengan kebutuhan sosial yang memuaskan.

2. Proses Terjadinya Lembaga Sosial

Proses terjadinya lembaga sosial ini diawali dari dorongan dasar dalam diri manusia untuk mencari kebutuhan –kebutuhan dasar tersebut yang disebut *basic human drives*, yaitu 1) pertahanan diri (*self preservation*) untuk hidup dari serangan kelompok lain yang lebih kuat, 2) mempertahankan ras (*self perpetuation*) dan nama keluarga (keturunan),

seperti dorongan sex, 3) ekspresi (*self expression*) yang tampak dari berbagai keaktifan manusia.

Dari ketiga unsur tersebut berubah menjadi *human needs* (kebutuhan) dan selanjutnya mendorong untuk bertindak laku (*human activities*) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*human interest*)

3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Sosial

Tujuan lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan tersebut bermacam-macam sehingga akan melahirkan bermacam lembaga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut.

Fungsi dari lembaga social adalah : 1) member pedoman bagaimana masyarakat bertindak laku, 2) menjaga keutuhan dalam masyarakat tersebut, 3) sebagai pengayaan bagi anggota masyarakat untuk mengadakan social order yaitu system perluasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Menurut Sayogyo (1996), cara atau proses melakukan kontrol sosial dapat di lakukan dengan :

- a. Proses ajar, didik atau pewarisan (adat/pola kebudayaan)
- b. Sanksi (hukuman/pahala)

- c. Dalam ritus kolektif
- d. Dengan alokasi posisi-posisi

4. Lembaga-Lembaga Fungsional di Desa

a. Lembaga Kepemimpinan

Ada 3 konsep tentang kepemimpinan, menurut Weber yaitu :

- **Pimpinan kharismatis**, dimana ia memiliki kesaktian yang tidak ada pad orang lain didapat dari Tuhan/Dewa. Pimpinan ini diakui selama ia masih memiliki kharisma.
- **Pimpinan tradisional**, didasarkan pada pengakuan akan tradisi yang didasarkan atas keturunan atau pewarisan kekuasaan. Misalnya yang memegang pimpinan desa adalah orang yang masih berasal dari keturunan pembuka desa pertama, maka generasi berikutnya juga memegang kepemimpinan tersebut.
- **Pimpinan rasional** (legalistik) didasarkan pada pendidikan sebagai ukuran dalam jabatan.

Dalam kenyataan seseorang bisa saja berlaku sebagai pimpinan kharismatis, tradisional maupun rasional atau tradisional dan

rasional, contohnya pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Contoh yang kedua anak lurah tetapi anak ini menempuh pendidikan formal dan mengganti ayahnya dalam kepemimpinan desa. Akan tetapi bisa saja terjadi lurah yang bukan keturunan maupun kharismastis, tetapi dengan ijazah yang dipilih untuk memimpin rakyat di desa.

Kepemimpinan identik dengan ide tentang kebapakan. Apapun yang diperintahkan harus dituruti. Dasar keyakinannya adalah Bapak tidak mungkin menjerumuskan si anak dan semuanya adalah untuk kebahagiaan si anak. Bapak adalah *key person*, yaitu orang yang memiliki kekuasaan dan mengendalikan orang lain.

b. Lembaga Keluarga

Keluarga di desa tidak hanya berfungsi semata-mata hanya melahirkan keturunan tetapi bisa sebagai unit ekonomi, yaitu adanya hubungan antar anggota keluarga (suami, istri dan anak yang sudah mampu bekerja) bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian. Jadi, ikatan kerja di desa tidak hanya diperkuat oleh : “*kata kasih sayang* “ tetapi diperkuat pula oleh ikatan “*unit produksi*”. Ikatan sebagai unit produksi ini tidak saja berlangsung dalam keluarga tetapi juga pada lingkungan tetangga.

c. Lembaga Ketetangaan dan Keagamaan

Ketetangaan dalam masyarakat desa, khususnya desa-desa di Indonesia masih memperlihatkan sifatnya sebagai kelompok primer. Hal ini terutama disebabkan karena masih terdapat atau ada system pertukaran jasa ((barter tenaga sesama mereka)

Adanya ikatan ini berpengaruh terhadap pengawasan sosial karena tetangga lebih merupakan perluasan dari keluarga, maka yang pertama berperan sebagai pengawas sosial adalah keluarga (*family control*) yang kemudian meluas ke seluruh masyarakat desa setempat. Contohnya dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku sehari-hari dimana masih Nampak campur tangan tetangga baik secara langsung maupun tidak pada pendidikan anak-anak.

Lembaga keagamaan juga berperan penting bagi masyarakat desa terutama karena mereka terlibat di bidang pertanian yang masih tergantung pada alam. Hal ini menjadikan orang desa sangat patuh dan tunduk pada kekuatan-kekuatan alam (supernatural). Ini diekspresikan melalui upacara-upacara yang menyangkut berbagai aspek kehidupan mereka.

Upacara-upacara yang dilakukan pada dasarnya mempunyai fungsi untuk menetralkan rasa khawatir terhadap sesuatu peristiwa yang bakal terjadi atau mengatasi rasa ketidakpastian. Dengan demikian, agama bukan lagi sifatnya yang murni, namun sudah berbaur dengan unsur-unsur seperti tradisi atau adat.

C. Rangkuman

1. Lembaga sosial adalah pola –pola aktifitas dan budaya yang meliputi adat istiadat, tindakan, ide-ide dan sikap-sikap masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup/sosialnya
2. Proses lembaga sosial diawali dari diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mempertahankan diri, mempertahankan ras dan keluarga, dan selanjutnya terlihat pada aktifitas manusia.
3. Tujuan lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, sedang fungsinya adalah untuk pedoman bertingkah laku, menjaga ketuhanan dan pengawasan tingkah laku masyarakat.
4. Lembaga-lembaga fungsional di desa terdiri dari : 1) lembaga kepemimpinan, 2) lembaga keluarga , dan 3) lembaga ketetanggaan dan keagamaan

D. Pertanyaan

1. Jelaskan pengertian dan proses terjadinya lembaga social ?
2. Jelaskan 3 konsep tentang kepemimpinan menurut Weber dan berikan contohnya masing-masing ?
3. Dalam masyarakat desa, ide tentang kepemimpinan diidentikan dengan kebapakan, jelaskan apa maksudnya dan berikan contohnya ?
4. Jelaskan lembaga-lembaga social yang fungsional di desa ?

BAB VII

PERUBAHAN SOSIAL DI PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam bab VII ini dibahas tentang perubahan sosial yang terjadi di pedesaan. Bab ini terdiri dari sub-sub bab , yaitu a) pengertian perubahan sosial, b) kategori perubahan sosial, dan c) dimensi perubahan sosial di desa mencakup perubahan budaya, struktur dan interaksional.

2. Manfaat Perkuliahan

Materi ini bermanfaat untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang fenomena perubahan sosial di pedesaan

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis fenomena perubahan sosial di pedesaan, baik dari segi budaya, struktur maupun interaksi dalam masyarakat desa.

B. Materi

1. Pengertian Perubahan Sosial

Dalam sosiologi, pemahaman terhadap perubahan sosial sering dikaitkan dengan proses sosial, seperti modernisasi, industrialisasi dan pembangunan. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah perubahan perilaku sosial masyarakat merupakan fungsi manifest (fungsi yang tampak) dari suatu rekayasa sosial lewat upaya pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan industrialisasi menuju masyarakat modern. Menurut Giddens (1990) perubahan perilaku tersebut merupakan salah satu konsekuensi utama dari proses modernisasi yang dialami suatu masyarakat.

Perubahan sosial bisa disebabkan dari dalam masyarakat maupun karena faktor-faktor dari luar masyarakat. Terjadinya perubahan dalam masyarakat desa saat ini kebanyakan datang dari luar masyarakat, terutama dilihat dari segi komunikasi. Dengan komunikasi, ide-ide baru dan informasi baru akan merubah penilaian masyarakat tentang berbagai kebutuhan yang selanjutnya akan mengubah tindakan yang ada ke arah tindakan yang baru. Selain komunikasi, kesadaran akan keterbelakangan juga membawa perubahan masyarakat.

2. Kategori Perubahan Sosial

Rogers (1987) menjelaskan ada 3 kategori perubahan sosial, yaitu :

- a. *Immanent change* , yaitu suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar
- b. *Selective contact change*, yaitu outsider (pihak luar) secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide kepada anggota-anggota dari pada suatu sistem sosial.
- c. *Directed contact change* , yaitu apabila ide-ide baru atau cara-cara baru tersebut dibawa dengan sengaja oleh outsider.

Dari kategori diatas, dilihat kenyataan sekarang, kategori ketigalah yang banyak terjadi, misalnya akibat penggunaan kontrasepsi KB ataupun cara-cara pemeliharaan kesehatan. Ini dilakukan yang terencana melalui para penyuluh kesehatan seperti promotor kesehatan desa.

Bila suatu inovasi telah diterima dan kemudian orang-orang menolaknya, maka tindakan yang demikian disebut "*discountinuance*". Dengan demikian ada yang diterima dan dipakai terus dan ada yang tidak. Inovasi yang secara terus menerus dipakai seperti penggunaan pupuk, pestisida, benih-benih unggul dan sebagainya. Sedang inovasi yang tadinya diterima kemudian

ditolak (tidak dimanfaatkan) seperti bidang kesehatan lingkungan, yaitu penggunaan jamban keluarga (pada desa tertentu) pada waktu itu jamban keluarga hanya didrop begitu saja tanpa melihat kondisi masyarakat desa setempat.

3. Dimensi Perubahan Sosial

a. Perubahan Struktur Sosial di Pedesaan

Proses pembangunan pedesaan di daerah pertanian tidak lain adalah suatu perubahan sosial. Introduksi teknologi ke pedesaan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dimensi struktural. Masuknya traktor atau mesin penggiling padi ke pedesaan menyebabkan berkurangnya peranan buruh tani dalam pengolahan tanah dan berkurangnya peranan wanita dalam ekonomi keluarga di pedesaan.

Teknologi yang masuk ke desa tersebut banyak di kuasai oleh golongan ekonomi kelas atas atau menengah di desa. Golongan tersebut akan menentukan pasaran kerja di desa. Golongan tersebut akan menentukan pasaran kerja di desa. Berkembangnya teknologi transportasi di desa, seperti angkutan pedesaan ternyata menggeser para pengusaha kuda pedati atau "*delman*" dan penarik becak. Akibatnya, struktur ekonomi desa dikuasai oleh pemegang modal kuat, karena ciri dan teknologi selain produktivitasnya tinggi juga perlu biaya tinggi.

Teknologi yang datang ke desa tidak datang dengan sendirian tetapi diboncengi oleh birokrasi. Akibatnya, tidak sedikit peranan lembaga di desa menjadi bergeser fungsinya, misalnya LKMD berfungsi sebagai forum rakyat pedesaan, tetapi secara fungsional dan operasional ternyata tidak jelas sebagai kepala desa ditunjuk sebagai ketua LKMD. Akibatnya pengaruh negara melalui kepala desa tetap dominan. LKMD tidak menjadi aspirasi masyarakat tetapi aspirasi penguasa tidak berfungsi sebagai kontrol sosial dan tidak mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Demikian pula pada lembaga keluarga, kehidupan keluarga di kuasai oleh produk teknologi seperti televisi, listrik dan sebagainya. Struktur ekonomipun bergeser ke arah komersial yang ditunjukkan oleh bergesernya usaha tani skala kecil ke skala besar. Bersamaan dengan itu, keluarga para petani mulai bergeser dari struktur tradisional ke struktur kota. Dalam keluarga kaya aktifitasnya menjadi meningkat bila dibandingkan dengan daerah yang pengaruh teknologinya masih kurang. Akibat mekanisme, orang tua tidak mengikutsertakan lagi anak di kegiatan pengolahan usaha tani karena kegiatan usaha tani dapat ditangani “dengan mesin” sehingga aktifitas sekolah juga meningkat.

b. Perubahan Budaya di Pedesaan

Perubahan budaya menyangkut segi-segi non material sebagai akibat penemuan baru atau modernisasi. Artinya, terjadi integrasi atau konflik unsur baru dengan unsur lama sampai terjadi penolakan sama sekali. Peristiwa-peristiwa perubahan kebudayaan meliputi “*culture lag*”, “*culture survival*”, “*culture conflict*” dan “*culture shock*”.

Peristiwa “*culture lag*” dapat dilihat pada proses mekanisasi pertanian yang tidak diiringi dengan persiapan mental para petaninya sehingga banyak traktor atau alat-alat lainnya tidak berfungsi karena rusak tidak terpelihara.

Introduksi teknologi ke desa dapat menimbulkan “*culture survival*”. Banyak budaya masyarakat sudah kehilangan fungsi pentingnya, contohnya masuknya traktor menyebabkan peternak kerbau tidak lagi sebagai lambang struktur sosial dan sumber tenaga kerja pengelola sawah tetapi hanya untuk kesenjangan atau menabung saja.

Peristiwa “*culture conflict*” atau konflik budaya sifatnya sudah menyebar ke dalam berbagai tatanan sosial di pedesaan. Peristiwa ini terjadi akibat sifat relatifnya budaya dan canggihnya teknologi komunikasi. Peristiwa ini dapat dilihat pada kasus pesantren. Pesantren yang semula hanyalah merupakan pendidikan agama yang ortodoks, sebagai pusat spiritual sekarang proses pembangunan dituntut untuk membina lingkungan desa berdasarkan struktur

sosial budaya masyarakat. Sekarang, pesantren harus terbuka bagi penduduk desa demi terlaksananya swadaya dibidang sosial, budaya dan ekonomi. Semula pesantren untuk Kyai, sekarang bergeser menjadi milik yayasan sehingga mempengaruhi nilai kharismatik kyai dan sistem geneologis pesantren.

c. Perubahan Interaksional di Pedesaan

Dampak introduksi teknologi di pedesaan terhadap interaksi sangatlah penting, sebab melalui teknologi, aktifitas kerja menjadi lebih sederhana dan serba cepat. Hubungan antara sesama pekerja menjadi bersifat impersonal, sebab setiap pekerja bekerja menurut keahlian masing-masing. Hal ini berbeda dengan kegiatan pekerjaan tanpa teknologi, tidak bersifat spesialis dimana setiap orang dapat saling membantu bekerja yang tidak menuntut keahlian tertentu.

Teknologi berkaitan dengan perbatasan pekerjaan yang bersifat kerjasama sehingga dapat menimbulkan konflik pada komunitas pertanian. Adanya teknologi, praktek-praktek saling membantu menjadi terhenti dan kerjasama informal menjadi berkurang. Proses mekanisasi di daerah pertanian menyebabkan hubungan bersifat kontrak formal. Hubungan kerja menjadi formal yang terbatas pada keahliannya. Lambat laun dipedesaan akan muncul

organisasi formal tenaga kerja sebagai akibat adanya spesialisasi dan pembagian kerja.

Masuknya teknologi komunikasi ke desa menyebabkan hubungan sosial yang bercorak tatap muka menjadi hilang karena munculnya media komunikasi. Kegiatan tatap muka berupa pengajian atau kegiatan di mesjid mulai berkurang karena sudah ada televisi, radio atau kaset-kaset pengajian agama. Keadaan demikian mengurangi hubungan intim di desa. Begitu pula dengan masuknya sirkulasi uang di desa menghilangkan sistem gotong royong dan tolong menolong terutama adanya budaya padat karya dengan sistem upah, sehingga pola tolong menolong diganti dengan kerja pamrih.

C. Rangkuman

1. Perubahan sosial sering dikaitkan dengan modernisasi, industrialisasi dan pembangunan, sehingga pengertiannya adalah perubahan perilaku yang diakibatkan karena terjadinya modernisasi, industrialisasi dan pembangunan tersebut.
2. Perubahan sosial dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1) perubahan sosial yang berasal dari dalam system itu sendiri, 2) perubahan akibat ide-ide baru yang dibawa secara spontan oleh orang luar kepada anggota dari suatu sistem social, 3) perubahan yang dibawa secara sengaja.

3. Perubahan social di pedesaan berlangsung pada 3 dimensi, yaitu dimensi structural, dimensi budaya dan dimensi interaksional.

D. Pertanyaan

1. Berikanlah pengertian perubahan sosial yang berhubungan dengan gejala modernisasi di pedesaan ?
2. Salah satu kategori dari perubahan social adalah *immanent change*, jelaskan maksud dari konsep tersebut dan berikan contoh pad suatu kasus di pedesaan ?
3. Masuknya teknologi ke pedesaan membawa pengaruh terhadap dimensi struktur, budaya dan interaksi dalam masyarakat. Jelaskanlah pengaruh teknologi terhadap dimensi struktur di pedesaan, khususnya dalm bidang pertanian ?

BAB VIII

DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL DI PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Pada bab VIII ini diuraikan materi mengenai dinamika kelembagaan di pedesaan yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu : 1) pengertian kelembagaan, dan 2) perubahan kelembagaan dalam konteks perubahan social.

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami mengenai dinamika yang terjadi dalam kelembagaan di pedesaan akibat adanya perubahan sosial

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis fenomena kelembagaan, khususnya yang berhubungan dengan dinamika dan perubahan dalam kelembagaan di pedesaan

B. Materi

1. Pengertian Kelembagaan

Istilah “kelembagaan” menurut Tjondronegoro (1999) melihat kelembagaan sebagai bentuk yang dipertentangkan dengan organisasi. Artinya, kelembagaan sosial dan organisasi adalah sama-sama *social form* yang berada pada suatu garis kontinum, dimana kelembagaan berada disebelah kiri dan organisasi di sebelah kanan. Kelembagaan sosial adalah satu tata aturan yang dibentuk oleh masyarakat sehingga memiliki ciri-ciri tradisional dan non-formal, sementara organisasi lebih modern dan formal karena dibentuk dari atas.

Batasan Tjondronegoro ini tampaknya dekat dengan pengertian Brewer dalam Dove (1985), dimana kelembagaan adalah sebagai aturan dan norma yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Fokus Brewer adalah pada kelembagaan pengaturan penggunaan tanah komunal milik desa.

Kelembagan ini yang dilambangkan oleh eksistensi dewan tanah *doumtuatua* semakin lemah karena kalah oleh hukum formal tanah dari pihak penguasa. Dalam batasan yang disampaikan secara tegas oleh Hayami dan Kikuchi (1987) menggunakan istilah pranata dengan pengertian yang kurang lebih sama, yaitu: “Pranata disini diberi definisi secara luas sebagai aturan-aturan yang dikukuhkan dan kerjasama diantara penduduk dalam pemakaian sumberdaya dengan membantu sanksi oleh anggota komunitas. Aturan-aturan tersebut memudahkan

koordinasi mereka membentuk harapan-harapan yang sewajarnya yang dimiliki setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain. Menciptakan, memelihara dan mengubah pranata ini memerlukan tindakan kolektif yang berarti memerlukan biaya untuk perundingan dan pelaksanaan “(hal 29)

2. Perubahan Kelembagaan Dalam Konteks Perubahan Sosial

Tulisan Brewer (1985) mengamati historis perubahan kelembagaan dalam penggunaan tanah di dua desa (Desa Rasa dan Sila) di Bima Sumbawa Timur NTB. Perubahan disebabkan oleh kekuatan luar yang mengarahkan kepada dua sasaran, yaitu menghapuskan peladangan berpindah dan mengakhiri peranan desa terhadap penggunaan tanah pihak pembuat kebijakan yang tidak menghargai kelembagaan local, hanya efektif untuk tujuan kedua, sementara peladangan berpindah masih tetap berjalan karena adanya ketimpangan pemilikan tanah dalam situasi tingginya tekanan penduduk terhadap tanah.

Pada zaman pra penjajah, keputusan lembaga yang berperan menentukan tata guna tanah serta penyelesaian sengketa adalah *doumtuatua*, berupa dewan yang terdiri dari kaum tua-tua yang dihormati seluruh warga desa. Kepemilikan tanah pada saat itu bersifat komunal, dimana warga desa memiliki hak mutlak untuk mengusahakannya dan mendistribusikan di antara warga menurut aturan mereka. Aturan ini melemah ketika penjajah mengeluarkan UU Agraria tahun 1870

dimana sebagian tanah yang sebelumnya menjadi ladang berpindah berubah menjadi milik negara yang melarang penduduk menggarapnya lagi. Selain itu, kebijakan pajak yang mengeluarkan “surat putih” telah mendorong kepemilikan individual, bersamaan dengan melemahnya peran *doumtuatua*

Pada zaman kemerdekaan, peladangan berpindah tetap dilarang apalagi di tanah negara. Ketika berikutnya UUPA No.5 Tahun 1960 sebenarnya ada pengakuan terhadap hukum adat. Namun, pemerintah daerah Bima karena melihat telah merosotnya wewenang pemerintah kampung maka memutuskan untuk menghapuskan sama sekali hukum adat untuk urusan pengawasan tanah. Program *land reform* pernah juga dilakukan, namun ini memberi peluang kepada individu di luar desa yang memiliki uang untuk memiliki tanah di desa, sehingga tanah *guntay* menjadi banyak. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketimpangan dan banyak petani yang tidak bertanah terpaksa melakukan ladang berpindah.

Hayami dan Kikuchi (1987) memfokuskan kepada perubahan kelembagaan di pedesaan menghadapi tekanan penduduk dan modernisasi pertanian, khususnya teknologi maju. Hayami dan Kikuchi melihat perubahan kelembagaan dalam sisi pandang ekonomi, atau tepatnya organisasi produksi, yaitu hubungan kontrak antara petani dan buruh tani dikembangkan dalam satuan usaha tani keluarga (rumah tangga) petani.

Perubahan organisasi produksi (dari *bawon* dan *hunusan* kepada *ceblokan* dan *gama*) lebih disebabkan oleh persoalan tekanan penduduk terhadap lahan daripada peningkatan teknologi. Tekanan penduduk menyebabkan kembalian untuk tenaga kerja meningkat, artinya bagian untuk pemilik tanah meningkat dan buruh penyakap turun. Teknologi mungkin bersifat netral, namun struktur masyarakatlah yang menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan penguasaan tanah semenjak awal sangat menentukan ketimpangan bagian dari produksi yang pada akhirnya mendorong kepada terjadinya polarisasi.

Dari penelitiannya di dua desa di Filipina, Hayami dan Kikuchi menyimpulkan stratifikasi akan muncul apabila norma-norma desa lebih ketat (misalnya kuatnya hubungan antara pemilik dengan buruh tani), sehingga hanya akan terjadi struktur berlapis-lapis. Penerapan *land reform* telah menyebabkan bagian untuk tuan tanah diambil para penyakap yang beralih dari penyakap bagi hasil ke penyewa kontrak. Sementara itu pada desa lain, polarisasi terjadi disamping karena turunnya kembalian tenaga kerja dan pengaruh teknologi maju, namun yang lebih menentukan adalah karena struktur kepemilikan yang sudah timpang sejak semula. Akibat *land reform*, ketimpangan ini mendorong kepemilikan tanah yang lebih terpusat dan banyaknya tanah *guntay*. Namun, polarisasi juga sangat ditentukan oleh nilai-nilai kekeluargaan yang lebih longgar. Nilai longgar disebabkan karena pemilik tanah berada di luar desa, ditambah kebanyakan buruh tani adalah para pendatang.

Selanjutnya Tjondronegoro (1999) melihat perubahan pemerintahan desa yang semakin maju menjauhkannya dengan masyarakat desa. Perubahan ini hampir mutlak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan “dari atas desa”. Perubahan ini yang disebut dengan formalisasi desa, sudah terjadi semenjak zaman Belanda sampai dengan pemerintahan Orde Baru. Desa menjadi otonom ketika diperbolehkan mengatur diri sendiri dan memiliki kedudukan hukum. Kemudian lahir UU No. 5/1979 yang menyebabkan gap antara pemerintah desa dengan rakyatnya sendiri.

Untuk melihat perubahan kelembagaan dalam konteks perubahan sosial dari tulisan ketiga ahli diatas, dapat dilihat kesamaannya pada sisi level perubahan, yaitu perubahan kelembagaan, terjadi pada level organisasi, dimana yang berubah adalah struktur, hierarki, otoritas dan produksi.

Aspek kelembagaan diuraikan melalui *social form* desa sebagai satuan unit kajian. Dove, Hayami dan Kikuchi melakukan pengamatan pada dua desa untuk perbandingan, sedang kajian Tjondronegoro lebih pada kajian kebijakan dengan melihat perubahan-perubahan kebijakan dan pengaruhnya terhadap lembaga desa.

Jika dilihat sumber perubahan, maka sumber yang utama adalah dari luar desa yaitu kebijakan pemerintah yang berkuasa. Dalam Dove disampaikan bagaimana kebijakan agraria di zaman Belanda sampai pemerintah RI telah membatasi akses penduduk terhadap tanah dan menggantikan kedudukan *doumtuatua* yang sebelumnya berperan dalam pengaturan penguasaan tanah oleh penduduk

doumtuatus adalah dewan yang berkuasa dalam keputusan tata guna tanah, penetapan kebijakan dan penyelesaian persengketaan.

Sementara itu, Hayami dan Kikuchi melihat kebijakan berupa *land reform* di desa Filipina yang ikut mempengaruhi ketimpangan penguasaan dan distribusi nilai tambah dari tanah diantara pemilik, penyadap, penyewa dan buruh-buruh tani. Namun Hayami dan Kikuchi sangat menekankan pada pengaruh internal desa sendiri, terutama tingginya tekanan penduduk terhadap tanah sehingga kembalian untuk tenaga kerja menurun dibanding kembalian untuk tanah. Teknologi memang mendorong semakin rendahnya kembalian untuk tenaga kerja, namun sistem *hacienda* yang sudah timpang dari awallah yang mengarahkan ke polarisasi. Dengan kata lain, struktur kekuasaan dalam desa sendirilah yang lebih menentukan kemana arah perubahan stratifikasi atau polarisasi.

Selanjutnya, Tjondronegoro secara jelas menyebutkan bagaimana perubahan lingkungan luar desa dan kebijakan-kebijakan telah merubah lembaga desa, yaitu :

1. Komunikasi terbuka dengan luar mendorong kaitan antar warga desa yang sebelumnya bersifat geneologis ke teritorial.
2. Pemerintahan Belanda mendorong desa menjadi otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri, boleh memungut pajak dan memiliki kedudukan hukum

3. Pemerintahan Orde Baru mendorong desa menjadi seragam dengan adanya UU No. 5/1979 sehingga mendorong terjadinya formalisasi desa yang berorientasi ke atas.

Satu kesamaan dampak karena perubahan dari luar tersebut adalah kelembagaan desa menjadi formal (formalisasi), yang tidak hanya pada administrasi pemerintahan desa namun juga terhadap pranata-pranata lain khususnya dalam persoalan tanah. Sumber perubahan dalam Brewer adalah introduksi hukum formal tentang tanah, pada Hayami dan Kikuchi berupa land reform dan Tjondronegoro adalah formalisasi pengorganisasian desa melalui UU No.5/1979 setelah sebelumnya kebijakan pemerintahan Belanda.

Selain itu, meskipun ketiga tulisan terlihat bahwa fokusnya adalah kelembagaan, namun hal utama yang ikut adalah struktur sosial masyarakat desa. Pada Brewer dan Hayami dan Kikuchi terlihat adanya perubahan hubungan antara lapisan kedudukan tanah, serta ketimpangan sosial ekonomi secara luas disebabkan ketimpangan pemilik dan penguasaan tanah. Pada Tjondronegoro, juga disebutkan terjadinya stratifikasi, yaitu masyarakat yang semula merata menjadi semakin berlapis dan perenggangan lapisan atas dan bawah.

C. Rangkuman

Dari uraian diatas, terlihat kecenderungan bahwa perubahan yang terjadi pada kelembagaan setingkat desa terutama adalah karena pengaruh luar. Desa semakin jauh dari pemilikan psikologis warganya, bersamaan dengan memudarnya peranan lembaga-lembaga tradisioanl. Perubahan ini menyebabkan stuktur sosial masyarakatnya.

Namun demikian, mengutip pelajaran dari Hayami dan Kikuchi untuk pengembangan masyarakat desa ke depan, maka lembaga asli semestinya dimanfaatkan sebagai landasan untuk membangun pranata desa yang modern. Dari ketiga tulisan yang melakukan kajian historis, pembangunan yang telah mengabaikan lembaga-lembaga asli tersebut terbukti hanya menimbulkan perenggangan antar lapisan dan ketimpangan sosial ekonomi diantara warganya, atau semakin lemahnya kelembagaan desa yang semestinya mengikat warganya secara keseluruhan.

D. Pertanyaan

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan ketiga tulisan diatas mengenai perubahan kelembagaan dalm kontek perubahan sosial ?
2. Jelaskan bagaimana peranan dari dewan tanah (doumtuatua) sebelum masuknya UU Agraria tahun 1870 dan sesudahnya adanya UU tersebut ?

3. Apa yang mendorong terjadinya polarisasi dalam masyarakat desa berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Hayami dan Kikuchi ?

BAB IX

POLA KOMUNIKASI DI PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Bab IX ini menguraikan tentang pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat desa. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu : 1) komunikasi sebagai proses, 2) jaringan komunikasi tradisional, 3) jaringan komunikasi antar lapisan dan 4) media bahasa yang terus terang bagi masyarakat desa

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami jaringan komunikasi tradisional dan komunikasi antar lapisan dalam masyarakat desa serta bahasa terus terang yang cocok bagi masyarakat desa

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis jaringan komunikasi tradisional dalam masyarakat desa dan penggunaan bahasa terus terang dalam masyarakat desa.

B. Materi

1. Komunikasi Sebagai Proses

Komunikasi sebagai proses dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Proses komunikasi primer, berlaku tanpa alat, yaitu secara langsung dengan menggunakan bahasa, gerakan yang diberi arti khusus, aba-aba dan sebagainya
- b. Proses komunikasi sekunder, berlaku dengan menggunakan alat agar dapat melipatgandakan jumlah penerima pesan/amanat, yang berarti pula mengatasi hambatan-hambatan geografis (berupa alat radio, televisi) serta hambatan waktu (berupa alat telepon, radio dan buku).
Dalam hal ini alat-alat itu merupakan media massa.

Proses komunikasi primer mendasari pola komunikasi tradisional atau pola komunikasi lama dan proses komunikasi sekunder mendasari pola komunikasi baru atau pola komunikasi modern.

2. Jaringan Komunikasi Tradisional

Jaringan komunikasi tradisional adalah suatu jaringan komunikasi yang masih dianggap sangat penting oleh masyarakat pedesaan dimana ciri-cirinya adalah :

- a. Hubungan sosial antara pelakunya berlansung berhadapan muka
- b. Hubungan sosial yang terjadi sifatnya mendalam dan berlaku pada orang-orang yang berbeda “status”. Sebagai contoh adalah hubungan “patron-klien” atau hubungan Bapak-pengikut (anak buah)
- c. Pemberi pesan/amanat dinilai oleh si penerima pesan dari segi identitasnya (artinya :siapa dia) atau segi gengsinya dan bukan dari isi yang dibawakan pesan tersebut.
- d. Karena jaringan komunikasi tradisional adalah berjalan lama, maka pola tersebut sanggup menyebarkan berita-berita antara warga desanya.

Jaringan-jaringan komunikasi tradisional tidak hanya membawa pesan informasi tentang desa, tetapi juga merupakan suatu kewajiban timbal balik dan mengikat rasa kewajiban tersebut disebabkan karena diantara mereka ada yang merasa berhutang budi, yaitu suatu hutang yang tidak terbalas yang dapat dikembalikan dengan pelayanan kerja atau bahkan sesuatu yang melibatkan seseorang sedang mengalami kekerasan dari orang lain. Hubungan tersebut menggambarkan hubungan bapak-anak buah, dimana bapak adalah pelindung anak buah yang berada dalam bahaya.

3. Jaringan Komunikasi Antar Lapisan Sosial

Istilah “jaringan komunikasi tradisional” mengacu pada hubungan-hubungan dua pihak yang dicari dengan sengaja, berhadap-hadapan diantara orang perorangan dimana seseorang sebagai atasan yang lain sebagai bawahan. Proses komunikasi adalah proses tradisional yang didapatkan melalui hierarki dari generasi ke generasi.

Berdasarkan penelitian Sayogyo (1996) di Jawa menunjukkan bahwa di antara lapisan -lapisan sosial terdapat perbedaan pemimpin masyarakat dan agama dalam sistem komunikasi tradisional dalam memberi nasehat kepada masyarakat. Bagi wanita golongan atas mereka benar-benar terlibat dalam memberi dan meminta nasehat pemimpin ekonomi dan orang-orang miskin di desa hanya berperan sebagai penasehat saja.

4. Media Massa dan Bahasa Yang Terus Terang Bagi Masyarakat Desa

Gejala menyuburkan akronim dan eufimisme merupakan gejala yang sangat mengganggu kelancaran komunikasi. Padahal komunikasi harus senantiasa dilakukan secara jernih agar masyarakat menangkap semua fakta dengan jelas.

Mochtar Lubis dalam Prisma (1989) menjelaskan fenomena penggunaan akronim ini sudah sangat memprihatinkan karena ia bisa merusak bahasa dan merusak komunikasi. Ini disebabkan karena semua disingkat-singkat sehingga mekanisme berpikir orang juga terganggu karena selalu menebak-nebak apalagi penyingkatan dilakukan secara sistematis. Lama kelamaan kondisi ini semakin membingungkan dan tidak mengertinya masyarakat tentang kejadian sekitarnya, terutama masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan wawasan berpikirnya masih rendah.

Penggunaan akronim mulai tumbuh sejak masa demokrasi terpimpin, misalnya kata-kata Nasakom, manipol usdek dan gestapu. Pada masa orde baru, gejala ini makin hebat, seperti radio, televisi ataupun media cetak bahkan lembaga non pemerintahan termasuk ABRI juga melakukannya.

Bila dilakukan untuk agitasi politik, penggunaan akronim mungkin bisa efektif, namun bila semua diakronimkan justru tidak komunikatif, karena merusak kemampuan menyampaikan hal yang sebenarnya dan merusak kemampuan berkomunikasi secara jelas. Dilihat dari segi informasi, eufimisme merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai:

- a. Ketidakjujuran informasi, karena orang tidak melihat dengan jernih dan tajam. Orang terbawa untuk menghindari fakta-fakta yang menyakitkan dan tidak realistis melihat kenyataan

- b. Berakar pada budaya feodal, yang terbiasa dengan pola bahasa yang hierarkis.

Oleh karena itu, masyarakat harus dibiasakan bicara terus terang supaya mereka lebih jernih melihat realitas sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat, disamping orang lebih berani untuk berterus terang , masyarakat juga cepat mengetahui dan meresponi tentang kejadian di sekitarnya.

C. Rangkuman

1. Komunikasi sebagai proses dapat dibagi 2 yaitu proses komunikasi primer yang berlaku tanpa alat (secara langsung) dengan menggunakan bahasa, aba-aba dan sebagainya
2. Pola komunikasi masyarakat desa umumnya adalah pola komunikasi tradisional, yaitu yang dilakukan secara langsung dan berbentuk bahasa yang terus terang
3. Jaringan komunikasi tradisional tidak hanya membawa pesan-pesan informasi tentang desa, tetapi juga suatu kewajiban timbal balik seperti hubungan antaras bapak-anak buah (patron-klien)

D. Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk pola komunikasi dalam masyarakat desa dan berikan contohnya ?
2. Jelaskan perbedaan antara proses komunikasi primer dan sekunder ?
3. Jelaskan bagaimana jaringan komunikasi yang berlangsung antara lapisan sosial di desa ?

BAB X

KEMISKINAN DI PEDESAAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Materi pada bab X ini menguraikan tentang persoalan kemiskinan di pedesaan dan strategi masyarakat desa menghadapi kemiskinan tersebut. Bab ini terdiri dari sub-sub bab, yaitu 1) konsep kemiskinan, 2) dimensi kemiskinan, 3) karakteristik rumah tangga miskin, dan 4) strategi bertahan hidup rumah tangga miskin.

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami tentang persoalan kemiskinan di pedesaan dan cara/strategi yang dilakukan rumah tangga dalam menghadapi kemiskinan.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan persoalan kemiskinan dalam masyarakat desa dan mengetahui strategi yang mereka lakukan dalam menghadapi kemiskinan dalam rumah tangga di pedesaan.

B. Materi

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang sangat serius. Ada 3 macam konsep tentang kemiskinan, yaitu :

- *Kemiskinan Absolut* , yaitu dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret. Ukura tersebut berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan, papan). Masing-masing Negara mempunyai batasan kemiskinan absolute yang berbeda-beda sebab kebutuhan dasar masyarakat yang digunakan berbeda-beda pula.
- *Kemiskinan Relatif*, yaitu dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standart*, dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya dan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lainnya.
- *Kemiskinan Subjektif*, dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Kelompok yang menurut ukuran kita berada dibawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya miskin dan demikian pula sebaliknya

2. Dimensi Kemiskinan

- *Dimensi cultural*, mendekati masalah kemiskinan pada tingkat analisis individual, keluarga dan masyarakat. Tingkah laku individual ditandai dengan sifat seperti apatisme, fatalism, pasrah pada nasib dan sebagainya. Tingkat kerja ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang lebih besar, *free union or consensual marriages*. Sedang tingkat masyarakat ditunjukkan dengan tidak terintegrasinya kaum miskin dengan istitusi-institusi masyarakat secara efektif.
- *Dimensi situasional atau structural*, kemiskinan dilihat sebagai dampak dari system ekonomi yang mengutamakan akumulasi capital dan produk-produk teknologi modern. Program-program pembangunan yang dilaksanakan berupa intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya. Namun hanya kelompok kaya yang mendapat surplus.

3. Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Menurut sensus pertanian 1993, rumah tangga pertanian diartikan sebagai rumah tangga sekurang-kurangnya satu rumah tangganya melaksanakan kegiatan bertani atau berkebun, menanam tanaman kayu-

kayuan, beternak ikan dikolam, karamba maupun ditambak, menjadi nelayan melakukan perburuan, menangkap satwa liar atau mengusahakan ternak/unggas atau berusaha dalam pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Adapun karakteristik rumah tangga di pedesaan (Jawa) :
(Prasodjo,1993)

- a. Memiliki fungsi rangkap sebagai unit produksi, unit konsumsi, unit reproduksi dan juga unit interaksi social, ekonomi dan politik.
- b. Mempunyai tujuan untuk mencukupi kebutuhan anggotanya. Konsekuensinya adalah mengambil keputusan dan perilaku ekonomi secara rasional terutama dalam hal produksi
- c. Menghadapi kekurangan tanah dan modal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penghasilan unti tenaga kerja ditambah sehingga anak bernilai ekonomis untuk membantu kegiatan rumah tangga tersebut.

Berkaitan dengan pendidikan, penelitianPrasodjo juga melihat bahwa anggota keluarga petani dari rumah tangga miskin umumnya berpendidikan rendah hanya sampai Sekolah Dasar. Rendahnya pendidikan petani menyebabkan mereka tidak bisa bersaing di pasar tenaga kerja dan mendapat upah besar. Dari segi perumahan, umumnya masih sangat sederhana, berdinding setengah tembok, berlantai tanah,

beratap genteng atau rumbia, berventilasi buruk, serta kondisi pembuangan limbah yang kadangkala buruk.

Bila dilihat pola konsumsinya, Istiani dalam Restu (1992) mengemukakan bahwa pada musim paceklik terjadi pengurangan makanan, yaitu dari 3 kali sehari pada musim panen menjadi 2 kali sehari pada musim paceklik. Pada pagi hari, mereka memakan ubi, jagung atau bubur bahkan ada yang tidak makan sama sekali. Untuk memperoleh makananpun dilakukan dengan cara berhutang di warung desa.

4. Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Miskin

Terbatasnya sumber daya alam, lahan dan langkanya kesempatan kerja di pedesaan, menyebabkan rumah tangga petani tidak hanya bersumber dari pertanian saja, tetapi juga bersumber dari luar pertanian.

Menurut White (1977) dalam Sumitro (1986) mengemukakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling minimum mereka terpaksa mengerahkan hamper seluruh anggota rumah tangganya termasuk anak-anak. Mereka terjun kedalam kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mendukung usaha taninya tetapi dalam beragam kegiatan nafkah, termasuk pekerjaan buruh serabutan. Selain itu, mereka juga melakukan perubahan-perubahan dalam mata pencahariannya dimana salah satu

perubahan mata pencaharian tersebut disebabkan oleh tekanan pertambahan penduduk terhadap tanah pertanian.

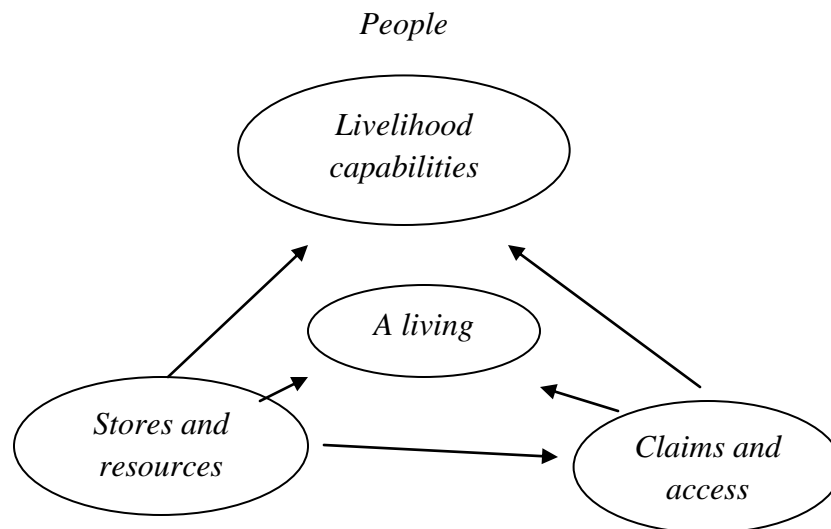
Akibat pertambahan penduduk dan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan luas areal di satu sisi dan tuntutan peningkatan taraf hidup di sisi lain, maka perlu merubah pola mata pencahariannya atau menambah jenis pekerjaan lain yang tidak hanyadi sektor pertanian tetapi juga diluar sektor pertanian. Pola pekerjaan seperti ini di sebut dengan pola nafkah ganda. Startegi pola nafkah ganda ini berbeda antara satu lapisan ke lapisan lainnya dalam rumah tangga petani, seperti yang dikemukakan oleh Sayogyo (1991), strategi pola nafkah ganda tersebut sebagai berikut :

- a. *Strategi akumulasi*, umumnya merupakan strategi petani lapisan atas, yaitu upaya mentransfer surplus pertanian untuk membesarkan usaha diluar sektor pertanian.
- b. *Strategi konsolidasi*, umumnya merupakan strategi petani lapisan menengah yaitu, upaya mempertimbangkan sector luar pertanian sebagai pengembangan ekonomi.
- c. Strategi bertahan hidup, merupakan strategi petani lapisan bawah, yaitu menunjuk pada pentingnya struktur di luar sektor pertanian sebagai sumber nafkah untuk menutupi kekurangan di sektor pertanian.

Menurut Redclift dalam Widiyanto (2010:2-3) menjelaskan bahwa orang-orang dalam posisi yang termarginalkan seperti petani, kelompok

usaha kecil dan keluarga petani dikatakan memiliki strategi bertahan hidup. Strategi bertahan hidup sering disebut *strategi survival* atau *strategi coping*. Secara umum strategi bertahan hidup didefinisikan sebagai tindakan ekonomi yang disengaja oleh rumah tangga dengan motivasi yang tinggi untuk memuaskan sebagian besar kebutuhan dasar manusia, paling tidak pada level minimum sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat.

Strategi nafkah merupakan perwujudan sistem penghidupan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Sustainable livelihood berarti harus mampu beradaptasi dengan shock dan tekanan, memelihara kapabilitas dan asset-asset yang dimiliki, dan menjamin penghidupan untuk generasi berikutnya Chambers dan Conway dalam Widiyanto, 2010 : 2). Menurut Chambers (1995) strategi nafkah mengacu pada sarana untuk memperoleh kehidupan, termasuk kemampuan berupa *tangible assets* dan *intangible asset*. Inti dari *libelihood* dapat dinyatakan sebagai kehidupan (*a living*). Asset-asset nyata (*tangible assets*) dan asset tidak nyata (*intangible assets*) berkontribusi terhadap kehidupan (*a living*). Berikut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Komponen dan bagan alur nafkah Rumah Tangga (Sumber Widiyanto, 2010 : 13)

Pada saat terjadinya kegagalan panen, harga yang turun dan sumber daya lahan yang tidak memadai dapat mempengaruhi sumber nafkah rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan munculnya respon dan upaya untuk mengadaptasi diri terhadap krisis. Ada dua proses penting respon individu atau rumah tangga dalam menghadapi krisis yaitu *coping* dan adaptasi. *Coping* mengacu pada strategi nafkah untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi, sedang adaptasi merupakan *adjustment* pada system nafkah dalam merespon perubahan yang bersifat jangka panjang berkaitan dengan sumber daya dan kesempatan. Tindakan *coping* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, menjaga persediaan makanan yang akan dikonsumsi. Hal ini

dilakukan dengan membeli makanan dan menerima makanan dari pihak lain tanpa membayar. *Kedua*, memodifikasi makanan yang dikonsumsi dengan cara mengurangi kuantitas dan kualitas makanan, diversifikasi sumber bahan jumlah konsumsi yang harus disediakan. Corbett dalam Widuanto 2010 mengidentifikasi tiga tahap langkah mengurangi resiko hingga perilaku coping yaitu: 1) mekanisme jaminan keamanan; 2) penjualan asset yang produktif; dan 3) kondisi penuh kemelaratan.

Strategi pola nafkah ganda, strategi lain yang dilakukan adalah memanfaatkan lembaga kesejahteraan asli, misalnya kelompok arisan, kelompok pengajian, serta perkumpulan kemandirian, seperti penelitian yang dilakukan Sitorus (1999) di NTT, Cirebon dan Jepara. Manfaat yang diperoleh dari lembaga kesejahteraan asli adalah : 1) manfaat ekonomi, yaitu sebagai sumber modal (untuk produksi dan konsumsi) dan tabungan, 2) manfaat sosial, yaitu peningkatan pengetahuan dan kebersamaan (solidaritas).

Bagi masyarakat nelayan, menurut Kusnadi (2002 : 35-45) dijelaskan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor fluktuasi musim ikan, perdagangan ikan yang eksploitasi terhadap nelayan sebagai produsen, dan bisa juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong pengurasan sumber daya laut secara berlebihan. Untuk menghadapi kemiskinan, berbagai pekerjaan dimasuki oleh isteri-isteri

nelayan untuk memperoleh penghasilan sebagai pengumpul kerang-kerangan, pengolahan hasil ikan, pembersih perahu/kapal yang baru mendarat, pengumpul nener, pekerja pada perusahaan penyimpanan udang beku atau industri rumah tangga untuk pengolahan hasil ikan, pembuat jaring, pedagang ikan eceran, pedagang ikan perantara, beternak, berkebun dan pemilik warung.

Selain isteri, anak-anak nelayan juga terlibat dalam memperoleh penghasilan. Anak laki-laki mengikuti ayahnya atau kerabatnya mencari ikan ke tengah laut atau membersihkan perahu yang baru tiba dari melaut. Anak-anak perempuan membantu dalam industri pengolahan ikan. Dalam masyarakat nelayan Madura di Desa Pesisir, anak laki-laki mencari *nener* ikan bandeng pada sore hari, ikut menangkap ikan pada saat libur sekolah, atau meminta ikan kepada nelayan yang baru tiba melaut (disebut dengan istilah *ngojur*). Hasil dari ngojur dijual ke pedagang ikan. Uang hasil penjualan tersebut sebagian diberikan kepada ibunya dan sebagian lagi untuk dimanfaatkan sendiri untuk jajan dan uang saku sekolahnya.

Masyarakat nelayan di Ujung Muloh Aceh, disamping menangkap ikan di laut juga bekerja sebagai petani dengan menggarap lahan-lahan pertanian dan perladangan yang bisa ditanami padi, cengkeh, dan tanaman lainnya. Bila musim tanam tiba, mereka melaut untuk sementara waktu karena harus menanam padi. Hal serupa juga dilakukan pada saat panen tiba.

Disamping itu, baik nelayan atau isterinya juga kreatif menciptakan pranata-pranata tradisional dengan membentuk kelompok pengajian, simpan pinjam dan arisan. Aktifitas tersebut dapat berfungsi ganda yaitu mengeratkan hubungan-hubungan sosial budaya dan membantu mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi. Strategi lain yang dilakukan adalah menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang membentuk suatu jaringan sosial. Fungsi jaringan sosial ini adalah untuk memudahkan anggota-anggotanya memperoleh akses ke sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Jaringan sosial dapat dibentuk berdasarkan basis kerabat, tetangga, pertemanan, atau campuran dari unsur-unsur tersebut. Jaringan sosial anggotanya bervariasi tingkat kemampuan sosial ekonominya akan mewujudkan patron-klien. Isi dari jaringan hubungan-hubungan sosial tersebut adalah tukar-menukar dan peminjaman timbal balik sumber daya ekonomi, seperti uang, barang (bahan konsumsi), atau jasa.

Selain pranata jaringan sosial, lembaga-lembaga pegadaian pemerintah atau swasta merupakan salah satu sumber peminjaman keuangan bagi rumah tangga nelayan miskin. Nelayan akan menggadaikan barang-barang mereka, dan bahkan jika sumber-sumber peminjaman lain sudah tertutup, maka isteri-

isteri nelayan akan menjual barang-barang yang dimiliki atau meminjam ke rentenir.

Friedmann (1992) menjelaskan bahwa ada delapan dasar kekuatan social untuk memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga miskin, yaitu :

- a. Ruang bertahan hidup, merupakan dasar territorial dari ekonomi rumah tangga
- b. Waktu berlebih, yaitu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi rumah tangga guna mencapai suatu kehidupan rumah tangga yang subsistem
- c. Pengetahuan dan keahlian yang berhubungan dengan tingkat pendidikan dan keahlian khusus anggota rumah tangga
- d. Informasi tepat yang bisa didapatkan
- e. Organisasi social, baik formal maupun informal dimana anggota keluarga terlibat didalamnya
- f. Jaringan sosial yang secara social didasarkan pada pola resiprositas
- g. Alat-alat bekerja dan mata pencahariannya
- h. Sumberdaya keuangan

Redclift dalam Widiyanto (2010;2-3) menjelaskan bahwa orang-orang dalam posisi yang termarginalkan seperti petani, kelompok usaha kecil dan keluarga petani dikatakan memiliki strategi dalam bertahan hidup. Strategi bertahan

hidup sering disebut *strategi survival* atau *strategi coping*. Secara umum strategi bertahan hidup didefinisikan sebagai

C. Rangkuman

1. Kemiskinan meliputi 3 macam konsep yaitu : a) kemiskinan absolute dengan membuat ukuran tertentu yang konkret, b) kemiskinan relative, yaitu berdasarkan tempat dan waktu, c) kemiskinan subjektif, yaitu berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri.
2. Dimensi kemiskinan terdiri dari : 1) dimensi cultural, mendekati masalah kemiskinan dengan unit analisis secara individual, keluarga dan masyarakat, 2) dimensi situasional/structural, yaitu dilihat sebagai dampak dari akumulasi modal dan teknologi modern.
3. Karakteristik rumah tangga masyarakat desa dapat digambarkan bahwa keluarga mempunyai fungsi rangkap (unit produksi dan konsumsi), untuk mencukupi kebutuhan hidup, kekurangan tanah dan modal, pendidikan rendah, perumahan sederhana dan musim paceklik menghadapi kekurangan makanan.
4. Untuk bertahan hidup, rumah tangga di pedesaan melakukan strategi pola nafkah ganda (melakukan kegiatan ekonomi lain untuk menunjang usaha

taninya) dan strategi social dengan memanfaatkan lembaga kesejahteraan asli.

D. Pertanyaan

1. Jelaskan 3 konsep tentang kemiskinan dan berikan contoh dari masing-masingnya ?
2. Jelaskan perbedaan antara kemiskinan kultural dengan kemiskinan structural. Berikan penjelasan anda dengan contohnya masing-masing ?
3. Jelaskan bagaimana strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di pedesaan ?

BAB XI

SISTEM EKONOMI PASAR DALAM MASYARAKAT DESA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Bab XI ini menguraikan tentang system ekonomi pasar dalm masyarakat di pedesaan. Bab ini terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut : 1) pengertian pasar, dan 2) mode perilaku ekonomi masyarakat desa yaitu perilaku timbal balik (*resiprositas*), berbagi (*redistribusi*) dan tukar menukar (*exchange*)

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami ekonomi pasar dan bentuk-bentuk/mode prilaku ekonomi dalam masyarakat desa.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan ekonomi pasar dan bentuk-bentuk/mode perilaku ekonomi dalam masyarakat desa serta dapat membedakan tiga mode perilaku ekonomi tersebut.

B. Materi

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah suatu tempat pertemuan untuk tujuan barter, pembelian dan penjualan. Barter, perdagangan dan tukar menukar merupakan prinsip perilaku ekonomi yang memiliki tingkat efektifitas yang tergantung dengan pola pasar. Semua barang dan jasa termasuk penggunaan tenaga kerja, tanah dan modal dapat dibeli di pasar karena semuanya memiliki suatu harga.

Dalam ilmu ekonomi formal, system pasar merupakan suatu bentuk tata ekonomi tertentu yang tercermin dalam lembaga-lembaga yang menyebabkan pilihan-pilihan perorangan melahirkan gerakan yang saling tergantung satu sama lain sebagai suatu proses ekonomi maupun non ekonomi.

2. Mode Perilaku Ekonomi Masyarakat Desa

Polanyi (1988) membedakan tiga mode perilaku ekonomi atau cara kelembagaan pasar dalam mengorganisasikan produksi dan redistribusi, yaitu :

a. Perilaku Timbal Balik (Resiprositas)

Untuk mencapai tujuan ini harus membagi diri menjadi kelompok-kelompok lebih kecil dalam anggota yang terdiri dari kelompok tersebut. Anggota-anggota kelompok A dapat menjalin hubungan dengan anggota kelompok B begitu juga sebaliknya. Pada perilaku ini terdapat hubungan yang tidak setara terbatas pada hubungan antara dua kelompok saja, sedang tiga, empat atau lebih kelompok dapat membentuk hubungan yang setara. Anggota-anggota kelompok tidak hanya berhubungan timbal balik dengan sesamanya, tetapi juga dengan anggota kelompok ketiga yang juga berhubungan setara dengan mereka.

Semakin anggota-anggota suatu masyarakat merasa dekat satu sama lain, semakin umum pula kecenderungan untuk mengembangkan sikap timbal balik. Hubungan ini dapat dijumpai pada hubungan keluarga, hubungan bertetangga, totem, himpunan kemiliteran, kejuruan, keagamaan dan social.

Perilaku timbal balik sebagai suatu bentuk integrasi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan perilaku berbagi dan perilaku tukar menukar, yaitu diperoleh melalui perilaku memikul beban kerja bersama yang juga sebagai aturan perilaku berbagi, seperti kerja giliran. Selanjutnya

tukar menukar diperoleh pada nilai tukar tertentu untuk kepentingan anggota/rekannya yang sedang kekurangan.

b. Prilaku Berbagi (Redistribusi)

Prilaku berbagi terdapat dalam suatu kelompok sepanjang lokasi barang terkumpul dalam satu tangandan berlangsung berdasarkan adat, hukum atau keputusan ad hoc dari pusat. Kadang-kadang prilaku berbagi ini berarti suatu pengumpulan barang fisik disertai penyimpanan dan pembagian kembali, tetapi ada juga “ Pengumpulan” tidak bersifat fisik, seperti mendapat hak atau wewenang untuk membagikan barang ditempat barang yang terkumpul.

c. Prilaku Tukar Menukar (Exchange)

Prilaku tukar menukar membutuhkan sistem pendukung dalam bentuk pasar pencipta harga. Prilaku ini dibedakan pada tiga macam, yaitu 1) Menyangkut gerak lokasi dalam ari “pindah tempat” antara tangan (prilaku tukar menukar operasional), 2) Tukar menukar yang bersifat gerak kepemilikan, baik berdasarkan suatu harga pasti (prilaku tukar menukar hak) maupun berdasarkan suatu harga hasil tawar menawar (prilaku tukar menukar integratif).

Prilaku tukar menukar berdasarkan harga pasti berhubungan dengan keuntungan masing-masing pihak, yang tersirat dalam keputusan untuk mengadakan tukar menukar. Prilaku tukar menukar berdasarkan harga yang berfluktuasi bertujuan mencari keuntungan yang diperoleh dari hubungan antagonistic antara pihak-pihak yang terlibat.

Munculnya bentuk pasar sebagai suatu kekuatan utama dalam kehidupan ekonomi dapat ditelusuri dengan cara melihat sejauhmana tanah dan bahkan pangan yang digunakan untuk tukar-menukar dan tenaga kerja yang dijadikan sebagai komoditi bebas yang dapat dibeli di pasar.

Dalam kajian Dewey (1987), ia mengkaji adanya saling keterkaitan antara berbagai faktor ekonomi dan sosial. Umumnya petani yang buta huruf tidak memanfaatkan bank. Uang hanya diterima sebagai alat pembayaran dan pertukaran barter tidak pernah ditemukan di Jawa. Pasar menjadi sangat penting sebagai sumber utama dimana uang kontan diperoleh.

Mode ekonomi Polanyi dapat dilihat pada prilaku timbal balik pada hubungan kekerabatan, ketetanggan atau hubungan patron dan klien. Dalam hubungan tersebut juga terdapat prilaku redistribusi dan prilaku pertukaran. Selain hubungan antara patron dan klien juga terdapat

hubungan pertukaran dengan para pedagang lain serta dengan pedagang perantara

Petani-petani miskin berhubungan dengan petani-petani kaya dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Para klien mendukung patronnya dalam politik. Sebaliknya para klien ditolng dengan memberinya pekerjaan dan makanan. Agar berhasil di pasar, tergantung pada kemampuan dalam mencukupi tenaga kerja dalam pertanian. Patron harus menjaga hubungan dengan klien untuk tetap loyal dengan memberi bantuan pinjaman atau memberi uang, makanan dan barang-barang lain atau berhubungan dengan dunia luar. Jika tidak patron akan ditinggalkan oleh klien, akibatnya ia kekurangan tenaga kerja.

C. Rangkuman

1. Pasar adalah suatu tempat pertemuan untuk tujuan barter, pembelian dan penjualan.
2. Prilaku ekonomi masyarakat desa terdiri dari 3 bentuk, yaitu : a) Resiprositas (timbang balik), adalah prilaku berbagi dengan memikul beban kerja bersama atau tukar menukar untuk kepentingan anggota atau rekannya yang sedang kekurangan, b) Redistribusi (berbagi) yang terdapat dalam suatu kelomk sepanjang barang terkumpul dalam satau tangan berdasarkan adat, hukum atau keputusan dari pusat baik berupa barang

maupun hak dan wewenang untuk membagikan suatu barang, c) Tukar menukar (exchange) membutuhkan sistem pendukung dalam bentuk pasar penciptaan harga menyangkut lokasi, kepemilikan dan harga.

D. Pertanyaan

1. Jelaskan pengertian dari pasar ?
2. Jelaskan tiga mode/bentuk perilaku ekonomi dalam masyarakat desa yang diungkapkan oleh Polanyi dan diberikan contoh kasusnya ?
3. Dalam kajian Dewey, terdapat hubungan antara faktor ekonomi dan sosial dalam sistem pasar masyarakat pedesaan di Jawa. Jelaskan hubungan kedua faktor tersebut ?

BAB XII

WANITA DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Pada bab XII ini berisi tentang wanita dalam pembangunan desa, termasuk partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi rumah tangga. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu a) Konsep-konsep gender (sex gender system, WID, WAD dan GAD), b) Dampak pembangunan terhadap wanita, c) Partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi rumah tangga.

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep gender dalam pembangunan, partisipasi wanita dalam pembangunan dan dampaknya terhadap wanita itu sendiri, serta keterlibatan mereka dalam ekonomi rumah tangga di pedesaan

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep gender dalam pembangunan dan dampaknya terhadap perempuan serta partisipasi wanita dalam ekonomi rumah tangga di pedesaan.

B. Materi

1. Konsep-Konsep Gender

Eviota (1992) menjelaskan konsep “*sex-gender system*” melihat hubungan antara pria dan wanita yang berbasis gender. Pada aspek sosial, hubungan perbedaan dapat dilihat pada masyarakat berburu dan meramu dengan adanya pembagian tenaga kerja secara sosial dimana wanita berperan sebagai peramu dan laki-laki sebagai pemburu. Wanita secara reproduksi bertanggung jawab untuk keperluan subsistem sehari-hari, misalnya mengumpulkan akar-akar tumbuhan dan buah-buahan setelah itu hasilnya dibudidayakan melalui pertanian dan alat pertanian. Sedang laki-laki pergi berburu untuk menyediakan daging dengan teknologi berburu yang dimiliki.

Hierarki jenis kelamin muncul pada pembagian kerja pada masa tersebut, dimana tindakan berburu merupakan tindakan agresif dan mengandung banyak resiko. Pada masa transisi sudah ada pertanian menetap dan surplus produksi. Wanita berperan sebagai sumber utama penghasil makanan. Namun, karena adanya sistem kepemilikan, kekerabatan dan hirarki kelas menciptakan dominasi pria yang secara ekonomi dan politik menimbulkan subordinasi terhadap wanita.

Setelah pembentukan negara, terjadi kristalisasi differensiasi kelas yang membuat jender sebagai kategori yang penting. Kategori ini

mengklasifikasikan orang sebagai dominan dan subordinat. Wanita ditaklukkan pria dengan menjadi kepala rumah tangga, hak wanita terhadap properti dibatasi untuk akses sumber daya produktif.

Dalam organisasi politik kosmologik, wanita berperan sebagai pengajaran atau khutbah acara ritual. Ketika terjadi perang, wanita dikalangan elit diberi kesempatan untuk membentuk persekutuan agar pihak elit laki-laki (suaminya) mendapatkan kekuasaan dan dominasi politik. Dalam sistem perdagangan siapa yang memproduksi barang, menyediakan dan mendistribusikan merupakan elemen yang penting. Dalam sistem ini perempuan dapat dijadikan sebagai akses untuk memperluas jaringan perdagangan dan bahkan ia juga diperdagangkan.

Sex-gender system dapat melihat bagaimana aspek sejarah dan kondisi perbedaan hubungan sosial antara wanita dan pria di masa lalu, sehingga dijadikan sebagai pengetahuan dalam membuat dan menganalisis kebijakan tentang perempuan/jender dalam pembangunan sekarang apakah masih relevan menggunakan konsep tersebut melihat peran, kedudukan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh wanita dan pria dalam perencanaan, penyusunan program-program pembangunan dan mengevaluasi program-program pembangunan tersebut.

Di negara Dunia Ketiga, Saptari dan Holzner (1997) mengungkapkan kebijakan terhadap kelompok perempuan dengan istilah perempuan dalam pembangunan (WID) dan perempuan dan pembangunan (W&D). WID merupakan usaha praktis untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam pembangunan, sedang W&D mengulas kritikan terhadap peranan perempuan dalam pembangunan, pengaruh kebijakan dan proyek-proyek pembangunan terhadap perempuan.

Selanjutnya Van Bemmelen (1995) menggunakan istilah gender dan pembangunan (GAD) untuk memberi keadilan dan kewajaran dari keuntungan-keuntungan pembangunan bagi kaum perempuan. Alasan menggunakan konsep ini karena adanya ketidakpuasan terhadap perbedaan pria dan wanita secara biologis dan kategori pria dan wanita sebagai konstruksi sosial yang membentuk identitas pria dan wanita, pola-pola perilaku dan kegiatan pria dan wanita. GAD dapat diwujudkan jika masyarakat terutama badan-badan perencana dan penentu kebijakan termasuk aparat birokrat menyadari perbedaan dan ketimpangan gender.

2. Dampak Pembangunan Terhadap Wanita

a. Dampak terhadap Produksi

Dalam sistem produksi pertanian subsistem, pertukaran yang terjadi dalam rumah tangga hanya pada barang-barang komplementer sifatnya. Mereka membawa produk untuk ditukarkan dengan barang-barang yang mereka

butuhkan. Setelah masuknya budaya kapitalisme menjadikan produksi barang-barang untuk dijual dan dikomersialisasikan. Dengan upah orang bisa membeli barang yang diinginkan di pasar. Orang juga lebih menyukai bekerja untuk mendapatkan upah dibandingkan bekerja untuk rumah tangga.

Bekerjanya wanita di luar rumah, mengakibatkan wanita sepenuhnya tidak berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak tergantung lagi dengan pria. Namun, ketika masuk dalam aspek ekonomi pekerjaan mereka dinilai dengan posisi subordinat dalam hirarki jender hingga upah mereka selalu rendah.

b. Dampak terhadap Ekonomi

Selama Revolusi Hijau, wanita banyak kehilangan pekerjaan dalam kegiatan pertanian dan tingkat partisipasi mereka menurun. Namun, pada masyarakat Kantu di Kalimantan, menunjukkan wanita dengan sistem ladang mempunyai akses yang tinggi sebab partisipasinya tinggi dalam pengolahan cash crop karet sebagai komoditas. Partisipasi wanita dalam kegiatan perdagangan dan industri di pedesaan juga tinggi karena wanita pedesaan di Indonesia terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan tahapan produksi pertanian, perburuhan, penjualan tanah dan pengelolaan tenaga kerja.

Namun demikian, upah wanita di bidang pertanian dan industri pedesaan lebih rendah dari laki-laki dengan alasan kerja mereka dianggap ringan, mudah dan bersifat tambahan dari upah laki-laki. Walaupun mereka bekerja secara aktif dalam sistem produksi, namun keterlibatannya selalu diwarnai oleh peran mereka dalam rumah tangga sehingga mereka selalu berada dalam posisi marginal dan dieksploitasi.

c. Dampak terhadap Reproduksi

Dalam kebijakan persoalan kependudukan, wanita selalu dituntut mengendalikan fertilitas dengan adanya program KB. Namun, dampak KB menjadi negatif bila pelaksanaan medis dilakukan secara sembrono, informasi yang tidak lengkap tentang pencegahan kehamilan atau efek samping dari kontrasepsi tertentu dan tidak sesuai dengan kondisi fisik wanita. Sehingga ada metode KB yang menimbulkan resiko kesehatan seperti tekanan darah tinggi, ketidakteraturan haid, pendarahan dan sakit kepala. Kebijakan KB diasumsikan sebagai pemenuhan hasrat seks pria terhadap wanita secara pasif.

3. Partisipasi Wanita Dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga

Keterlibatan perempuan Dari penelitian Sumardjo (1988) partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi rumah tangga dipedesaan dapat dilihat pada :

a. Partisipasi dalam Proses Perencanaan

Partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari peran serta keterlibatan wanita sebagai istri dalam pengambilan keputusan yang menyangkut aspek : pembagian kerja bagi anggota rumah tangga , pencarian nafkah dan pemasaran hasil produksi serta dalam hal konsumsi pangan, peralatan rumah tangga dan pakaian maupun perumahan.

Tahap ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1) untuk kegiatan memenuhi kebutuhan nafkah (“supply”) rumah tangga adalah siapa yang harus mencari nafkah, siapa yang harus melakukan pekerjaan tertentu atau pembagian kerja anggota rumah tangga dan pemasaran hasil produksi, 2) Untuk kegiatan mengatur prioritas konsumsi pokok anggota rumah tangga adalah pengaturan konsumsi makan dan pakaian anggota rumah tangga khususnya anak-anak, pembelian perlengkapan rumah tangga dan perumahan.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi

Partisipasi wanita dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi rumah tangga sangat tepat bila diukur dari curahan waktu atau tenaganya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga. Curahan waktu atau tenaga anggota rumah tangga dalam sehari dapat dibedakan dalam lima kategori yaitu : 1) Kegiatan mengurus rumah tangga , misalnya memasak, mengasuh anak, membersihkan peralatan rumah tangga, mendidik anak dan kegiatan lain karena mempunyai

nilai waktu, 2) Kegiatan nafkah, misalnya bekerja pada usaha sendiri atau pada pihak lain dalam usaha tani maupun usaha non tani yang menghasilkan nafkah secara langsung maupun tidak langsung, 3) Kegiatan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya rekreasi dan melakukan ibadah/sosial, 4) curahan waktu untuk tidur.

c. Partisipasi dalam Evaluasi Kegiatan Ekonomi

Partisipasi pada tahap evaluasi kegiatan ekonomi rumah tangga dapat diukur dari sejauh mana keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan untuk menentukan alokasi dana dari pendapatan rumah tangga untuk keperluan ekonomi rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan hasil dari kegiatan ekonomi rumah tangga yang didukung oleh seluruh angkatan kerja dalam rumah tangga.

Penelitian Geertz dan Sobari dalam Pahmi Sy (2010) terlihat bagaimana adanya peran perempuan dalam ekonomi keluarga di pedesaan, terutama keluarga miskin. Geertz menunjukkan bahwa pedagang batik yang paling awal di Mojokuto adalah para isteri pegawai yang membantu menambha gaji suami-suami mereka yang tidak cukup. Penelitian Sobari di Pulau Jawa juga melihat umumnya perempuan di pedesaan terutama yang miskin juga mencari pekerjaan di pabrik-pabrik yang dipahami sebagai strategi ekonomi rumah tangga untuk memastikan adanya uang sepanjang tahun dibandingkan jumlah

upah yang sedikit. Mereka bekerja untuk meringankan sebagian beban yang ditanggung oleh keluarga/orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan di luar bidang pertanian menjadi semacam “lembaga” klep pengaman bagi mayoritas masyarakat desa yang miskin, dan kaum perempuan memainkan peran yang menentukan dalam ekonomi keluarga.

C. Rangkuman

1. Konsep-konsep gender dalam pembangunan, yaitu :

- Wanita dalam pembangunan (WID), yaitu usaha praktis untuk mengintegrasikan wanita dalam pembangunan
- Wanita dan pembangunan (W&D), yaitu mengulas kritikan terhadap peranan wanita dalam pembangunan, pengaruh kebijakan dan proyek-proyek pembangunan terhadap perempuan
- Gender dan Pembangunan (GAD), yaitu member keadilan dan kewajaran keuntungan pembangunan bagi kaum wanita

2. Dampak pembangunan terhadap wanita terlihat pada produksi, ekonomi dan konsumsi

3. Partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, yaitu :

- Proses perencanaan yaitu pembagian kerja, pencaharian nafkah, pemasaran hasil dan konsumsi

- Pelaksanaan kegiatan ekonomi, yaitu curahan waktu dan tenaga dalam kegiatan ekonomi
- Evaluasi kegiatan ekonomi yaitu dalam pengambilan keputusan menentukan alokasi dana untuk keperluan ekonomi rumah tangga

BAB XIII

DEMOKRASI DI DESA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Bab XIII ini menguraikan tentang demokrasi di pedesaan yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut : a) memudarnya otonomi di desa, b) pergeseran peran pemimpin di desa dan c) krisis kepemimpinan di Minangkabau

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami tentang fenomena demokrasi di pedesaan, yaitu memudarnya otonomi di desa, pergeseran peran pemimpin dan krisis kepemimpinan di desa termasuk kepemimpinan di Minangkabau.

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan fenomena otonomi desa yang berkurang akibat berlakunya UU No.5/1979 dan masuknya ekonomi uang ke dalam masyarakat desa, terjadinya pergeseran peran dan krisis kepemimpinan dalam masyarakat desa termasuk kepemimpinan di Minangkabau

B. Materi

1. Memudarnya Otonomi di Desa

Sejak diberlakukannya UU No. 5/1979, memberikan bentuk-bentuk “formalisasi desa” yang digambarkan dari atas sehingga ciri-ciri birokrasi semakin terasa ditingkat desa. Formalisasi tersebut menurut Tjondronegoro (1999) mengurangi otonomi desa secara bertahap mulai dari kelurahan, yaitu bentuk desa yang tidak menguasai cukup sumberdaya dan harta benda sendiri berbentuk tanah bengkok sehingga pamong desa juga tidak diberi imbalan untuk jasa-jasanya kepada masyarakat kecil.

Kepala kelurahan dan desa lambat laun diseragamkan dan diberi status pegawai negeri. Pemerintah pusat lebih mudah menyalurkan instruksi sampai ke tingkat desa. Pengawasan dari pusat juga lebih dipermudah setelah jalur birokrasi diperpanjang dari kecamatan ke bawah.

Masuknya ekonomi uang, merubah hubungan tradisional ke daerah pedesaan. Lembaga-lembaga yang semula didasarkan atas jiwa gotong royong dan kemandirian retak dan pengaruh kota makin mengikis hubungan pedesaan tradisional. Organisasi yang berakar di daerah perkotaan meluas ke desa dan kepentingan kota lebih terpenuhi (permintaan, perkreditan barang-barang konsumsi dan sebagainya)

Lembaga-lembaga tradisional semakin mengecil dan kekuatan norma berkurang. Masyarakat desa yang semula lebih merata (egalitarian) tampak

semakin berlapis, kepentingan-kepentingan lapisan bertentangan sehingga timbul proses diferensiasi dan perenggangan yaitu melebarnya jarak sosial, kalau bukan pengasingan (alienasi) sifatnya, lembaga semakin mencirikan lapisan bawah dan lemah dan organisasi mencirikan lapisan tengah dengan orientasi dari atas dan kota.

2. Pergeseran Peran Pemimpin di Desa

Salah satu harapan dikeluarkannya UU NO.5/1979 adalah meletakkan dasar –dasar administrasi pemerintahan desa sehingga baik para pemimpin formal (kades dan pamong desa) maupun para pemimpin informal (kyai, ulama dan petani-petani kaya) semakin tahu dan mampu menjadi agen pembangunan. Khususnya berkaitan dengan fungsi mereka sebagai jembatan yang menghubungkan kemauan pemerintah dengan kepentingan anggota masyarakat.

Dalam dua dasawarsa terakhir, para pemimpin formal lebih banyak tergolong sebagai *visible leader* (kepemimpinan diakui oleh massa yang dipimpin dan pemimpin lain). Sementara itu, para pemimpin informal pada umumnya tergolong sebagai *symbolic leader* (diakui oleh massa yang dipimpin, namun tidak diakui oleh pemimpin lain). Kondisi ini disebabkan oleh strategi pembangunan ekonomi dipedesaan itu sendiri yang didominasi oleh sentralis. Perencanaan organisasi, pengawasan dan alokasi dana

pembangunan desa masih banyak di tentukan oleh pemerintah pusat (Sunanto, 2000)

Dengan strategi tersebut pimpinan formal dapat selalu tampil di garda depan dalam proses pembangunan karena mereka dipandang sebagai agen pembangunan yang menjembatani keinginan pemerintah dan masyarakat. Namun, kecendrungan demikian membuat pemimpin formal selalu dominan hampir disetiap lini. Sedang peran pemimpin informal semakin menyempit dan kurang begitu diperhitungkan. Akibatnya, semakin sedikit di antara pemimpin formal yang dapat dikategorikan sebagai *visible leader* dan *concealed leader* (hanya diakui oleh pemimpin lain, tetapi tidak diakui oleh massa yang dipimpinnya)

Pemimpin formal lebih banyak berpengaruh di berbagai bidang karena mereka adalah perpanjangan tangan birokrasi di tingkat desa. Sedang pemimpin informal seperti ulama, semakin berkonsentrasi hanya pada aktifitas keagamaan. Aktifitas mereka kurang menyentuh persoalan sosial politik. Kecendrungan demikian menjelaskan bahwa ulama semakin sulit melakukan fungsi kontrol terhadap aktifitas yang dilakukan oleh pamong desa.

3. Krisis Kepemimpinan di Minangkabau

Dilema kepemimpinan di Minangkabau tidak bisa dilihat sebagai sebuah gejala yang kasustik, saling melahirkan ironi kepercayaan bagi masyarakat Minang yang masih menaggap ideal figur-figur yang selalu dipandang sebagai pemimpin yang patut menjadi panutan. Dilema kepemimpinan menurut Ar Rizal (2003) menjadi sebuah krisis yang menggerogoti eksistensi budaya minangkabau karena kebobrokan kepemimpinan terjadi dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat terutama terjadi dari stuktur yang sistematis, bahwa kebobrokan kepemimpinan tersebut terjadi dalam prestisius, eksekutif dan legislatif.

Kepemimpinan eksekutif dan legislatif merupakan indikator dan aktualisasi kepemimpinan di Minangkabau karena tidak kontekstual lagi memaknai kepemimpinan Minangkabau yang hanya teraktualisasi di figur datuk, bundo kanduang dan pemangku adat yang dijadikan sebagai simbol seremonial.

Eksistensi kepemimpinan *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan* teraktualisasi dalam figur seorang kepala daerah/desa dan pemimpin formal lainnya karena mereka berperan sebagai penentu kebijakan. Krisis moral seperti korupsi yang dilakukan oleh pemimpin formal di Minangkabau merupakan sebuah proses penghancuran terhadap eksistensi adat dan budaya *kitabullah* Minangkabau. Prilaku pemimpin dianggap sebagai figur publik dan tauladan justru menjadi individu yang melanggar nilai adat dan budaya. Tidak

mungkin membentuk masyarakat Minangkabau yang berfalsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi*” sementara pemimpinnya bertindak sebagai pribadi yang tidak bermoral. Oleh karena itu , kader pemimpin harus dibentuk dengan membudayakan kader surau karena surau dalam adat dan budaya minangkabau tidak mempunyai hubungan birokratik dengan struktur formal sehingga menjadi pribadi yang tangguh.

C. Rangkuman

1. Memudarnya otonomi di desa disebabkan oleh adanya formalisasi desa melalui UU No.5/1979 dan masuknya ekonomi uang ke dalam desa
2. Di desa terjadi pergeseran kepemimpinan, yaitu pemimpin formal lebih sebagai *visible leader* (diakui oleh massa yang dipimpin dan pemimpin lain) dan dianggap sebagai perpanjangan tangan birokrasi di desa. Sementara pemimpin informal hanya *symbolic leader* (diakui oleh massa yang dipimpin tetapi diakui pemimpin lain) yang berkonsentrasi pada aktifitas keagamaan saja. Pergeseran ini disebabkan oleh strategi pembangunan ekonomi di pedesaan yang sentralistik.
3. Krisis moral para pemimpin formal didesa/kepala daerah di Minangkabau diakibatkan mereka melakukan korupsi sehingga dianggap menghancurkan eksistensi adat dan budaya Minang yang berfalsafah

“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.Oleh karena itu dibentuk kader kepemimpinan yang berbudaya surau.

D. Pertanyaan

1. Jelaskan penyebab mudarnya otonomi di desa berdasarkan pemikiran Tjondronegoro ?
2. Jelaskan bagaimana terjadinya gejala pergeseran kepemimpinan di pedesaan ?
3. Fenomena apa yang menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan formal desa di Minangkabau dan berikan contoh kasusnya ?

BAB XIV

STRATEGI DAN MODEL PEMBANGUNAN DESA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Bab XIV ini berisi tentang materi strategi dan model yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat desa. Bab ini terdiri dari sub-sub bab, yaitu : a) Strategi pembangunan desa (pembangunan pertanian, industrialisasi, pembangunan terpadu, pusat pertumbuhan dan pembangunan berparadigma ganda), b) model pembangunan desa (modernisasi, *community development*, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat)

2. Manfaat Perkuliahan

Mahasiswa dapat memahami tentang strategi dan model pembangunan yang dilakukan di pedesaan

3. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa strategi dan model pembangunan yang dilakukan terhadap masyarakat desa. Kemudian dapat membedakan antara strategi dan model pembangunan yang dilakukan tersebut.

B. Materi

1. Strategi Pembangunan Desa

Pemerintah di Negara sedang berkembang, termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Dalam program-program pedesaan tersebut terdapat berbagai strategi yang dilakukan dalam upaya membangun masyarakat desa, misalnya yang diungkapkan oleh Sunyoto Usman (1998) sebagai berikut :

a. Pembangunan Pertanian (Agricultural Development)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Fokusnya terarah pada usaha menjawab kelayakan tau keterbatasan pangan dipedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh masyarakat maju.

Kendati program pembangunan telah mendatangkan hasil riil yang gemilang, program ini memperoleh banyak kritik. Salah satunya adalah strategi pembangunan pertanian tidak secara optimal atau gagal

menciptakan masyarakat desa lepas dari kemiskinan. Kegagalan itu terjadi bukan karena kebijakan itu keliru tetapi karena kurang disertai dengan upaya reformasi diseluruh sektor. Contohnya, pemerintah secara nasional lamban dalam menata sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang masih didominasi oleh elit desa. Merekalah yang lebih banyak memanfaatkan modal atau dana pinjaman dengan bunga rendah dari pemerintah. Mereka pula yang memanfaatkan benih, pupuk dan obat-obat pertanian. Sementara itu, petani marginal, petani gurem dan buruh tani tersisih dari fasilitas tersebut.

b. Industrialisasi Pedesaan (Rural Industrialization)

Tugas utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi merupakan alternatif yang sangat strategis untuk menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan tenaga kerja.

Dalam prakteknya, industrialisasi di pedesaan mengalami hambatan, antara lain nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri, seperti kurang siap menyongsong industrialisasi, umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai, kurang berani mengambil resiko dan sulitnya melakukan reinvestasi. Keterampilan

umumnya masih tergolong rendah, peralatan sederhana, manajemen lemah sehingga sukar meningkatkan produksinya. Industri tidak banyak menciptakan kesempatan kerja karena tidak memiliki keterampilan dan sumber daya mereka yang lemah.

c. Pembangunan Masyarakat Terpadu (Integrated Rural Development)

Tujuan utama pembangunan terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta meperkuat kemandirian. Pendekatan ini menganjurkan adanya gabungan dari strategi *top down* dan *bottom up*. strategi *top down* terlalu diwarnai oleh pemaksaan, sementara *bottom up* dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan di tingkat bawah.

d. Strategi Pusat Pertumbuhan (Growth Centre Strategy)

Strategi ini merupakan sebuah alternative untuk mengembangkan sebuah pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagi pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan ini secara social dekat dengan

desa juga bisa menjawab persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian.

e. Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda

Jefta (1995) mengemukakan ada 4 strategi tentang pembangunan desa yang disebutnya sebagai strategi pembangunan berparadigma ganda, yaitu :

- Strategi pembangunan gotong royong, yaitu berasumsi pada paradigma struktural fungsional dan memandang masyarakat selalu berada dalam keadaan “harmonis” dan “tertib”. Strategi ini menganjurkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan masyarakat.
- Strategi teknikal profesional, yaitu menekankan perlunya sistem penyelesaian masalah melalui kelompok masyarakat mengembangkan norma-norma, peranan-peranan dan prosedur kerja baru untuk mengembangkan tanggapan baru terhadap situasi yang terus berubah. Strategi ini memberikan peranan yang lebih kritis terhadap agen-agen pembaharuan untuk menentukan program-program pembangunan
- Strategi konflik, yaitu melihat paksaan atau “kekuasaan” sebagai landasan yang lebih realistis bagi tertib sosial dalam masyarakat. Suatu sistem sosial terdiri dari berbagai kelompok kepentingan

dan distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara kelompok masyarakat. Pendekatan konflik menganjurkan perlunya mengorganisasikan lapisan penduduk miskin untuk mengartikulasikan permintaan mereka atas sumber daya masyarakat dan perlakuan adil dan demokratis.

- Strategi pembelotan cultural. Yaitu diasumsikan pada paradigma defenisi social yang memberikan tekanan pada aspek subjektif dan realistis kehidupan social. Nilai-nilai hidup kemanusiaan harus ditemukan dalam “penemuan diri “ (*self discovery*) dan prinsip “keberadan” terletak di dalam “kekayaan” dari suatu kepribadian yang bersifat otonom

2. Model Pembangunan Desa

a. Pendekatan Modernisasi

Pendekatan modernisasi untuk pembangunan desa sudah dimulai sejak tahun 1960-an melalui modernisasi pertanian (revolusi hijau). Kemudian modernisasi di bidang structural sosial politik sejak berlakunya UU No 5/1979 tentang pemerintah desa. Pembangunan desa dengan pendekatan modernisasi terpilah menjadi 2, yaitu modernisasi klasik dan modernisasi kajian baru. Tokoh modernisasi klasik terdiri dari smelser, leiners, eisenstadt

dan bellah. Sedang yang banyak mengkaji di bidang pertanian tokohnya adalah rogers.

Menurut smelser, modernisasi identik dengan pembangunan sekonomi yang menyangkut 4 proses, yaitu 1) bidang teknologi, yaitu merubah teknologi sederhana dan tradisional dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. 2) bidang pertanian, dilakukan dengan merubah struktur dan proses usha tani. 3) bidang industry yaitu mengganti tenaga manusia dan binatang dengan system mekanik. 4) bidang susunan ekologi, bergerak dari sawah/ladang dan desa ke pemusatan di kota-kota.

Apa yang smelser tersebut sedang dialami di Indonesia, sehingga mempengaruhi struktur social masyarkat tradisional dengan cara yang sama. Bagi smelser, modernisasi dapt menimbulkan diferensiasi struktur dan problem integrasi. Diferensiasi structural terjadi pada semua kelembagan di desa, sehingga keluarga tidak berfungsi sebagaimana fungsi keluarga pada keluarga tradisional. Dengan adanya diferensiasi, structur masyarkat desa tradisional jadi terganggu karena tersingkir oleh ekonomi dan teknologi yang efisien.

Dengan demikian, pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa tidak hanya mewarbai nilai masyarakat tetapi juag merombak system social dan struktur social masyarkat. Kasus revolusi hijau, selain mencapai swasembada beras juga telah menggoyahkan pranat distribusi “pemetaan

Patron-Klien". Tekanan penduduk dan orientasi pemodal berpihak kepada petani lapisan atas. Nampaknya, pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negative, yaitu banyaknya pengorbanan yang direlakan demi teknologi.

b. Pendekatan *Community Development*

Model *Community development* (CD) menurut Glenn (1993) menekankan pada proses semua usaha swadaya masyarakat dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dan member kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan kehidupannya.

Namun birokrat pemerintah terlalu dominan dan inisiatif lokal sering dianggap sebagai input dari luar. Kelemahan model CD, adalah hasilnya tidak sepadan dan manfaatnya mudah melenceng ke yang lebih kaya serta konflik dengan birokrasi pemerintah. Model CD, memandang proses pembangunan secara simlitis, mengabaikan kepentingan yang bertentangan serta tidak memperhatikan perubahan structural dalam masyarakat. Contohnya : kasus kelompok tani teladan juara tingkat propinsi dan nasional pada sebuah desa di Jawa Barat tahun 1990. Ketua kelompok yang semula jadi panutan warga berkurang wibawanya. Ketua hanya sibuk melayani aparat dan laporan administrasi. Pola relasinya semakin akrab dengan birokrasi, sementara

dengan kelompok sosialnya semakin jauh dengan anggota. Bila ingin menjadi juara harus siap modal sehingga tidak ada keinginan untuk mengembangkan kelompoknya.

Ketidakterdayan inisiatif lokal dan model pendekatan CD selalu muncul penunggang bebas (*free Rider*) berupa kepentingan politik dan birokrat.

c. Pendekatan Partisipatif

Partisipasi menurut Uphoff dan Cohen (1987) terdiri dari empat kegiatan, yaitu membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil dan penilaian terhadap seluruh kegiatan. Pengertian tersebut dapat dilihat pada kegiatan di desa seperti gotong royong, membuat jalan atau sarn keagman.

Pendekatan partisipatif ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik bagi mereka. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sementara itu para petugas (pemerintah) lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tujuan pendekatan ini adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya

melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh masyarakat. Pendekatan partisipatif disebut juga dengan pendekatan *non direktif*.

Pendekatan non direktif dilakukan dengan dasar bahwa masyarakat tahu apa yang seharusnya mereka butuhkan dan yang baik untuk mereka. Sedang pendekatan direktif melihat hasil banyak dicapai, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan seringkali bersifat pencapaian fisik. Pendekatan direktif kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang bersifat jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang terkait dengan perilaku seseorang.

Strategi partisipatif dapat melibatkan masyarakat pedesaan secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembiayaan proyek pembangunan, monitoring dan evaluasi program. Diharapkan strategi ini dapat lebih mengakar dalam masyarakat desa, karena keseluruhan kegiatan yang dilakukan berasal dari keinginan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) semakin populer dipandang sebagai sebuah konsep maupun pendekatan dalam pembangunan. Friedmann (1992) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan memiliki dua pendapat

tentang kekuasaan (power), yaitu kekuasaan bersifat *zero sum game* sedang yang lain menganggap kekuasaan ada dimana-mana. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah yang satu menganggap bahwa program pemberdayaan berarti mengambil/ meindahkan kekuasaan dari satu pihak, sedang yang lain menganggapnya sebagai peningkatan keuasan tanpa mengganggu pihak lain.

Memberdayakan masyarakat berarti memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya merupakan hal yang memang harus dilakukan. Menurut karyono dalam Priyono (1996) menjelaskan masyarakt pedesaan perlu diberdayakan karena mereka masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekuarangan dalm keswadayan, kemandirian, paritisipasi, solidaritas social, keterampilan, sikap kritis, system komunikasi personal, kekuasaan transformative, rendahnya mutu dan taraf hidup.

Kelompok masyarakat yang tidak berdaya seringkali tidak dapat berbuat apa-apa (powerless) dan tidak memiliki posisi tawar menawar sehingga membutuhkan pendamping. Petugas lapangan bagi masyarakat dapat berperan sebagai penggerak kegiatan program pembangunan.

Alifitri (201;23-24) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar *power* dalam pencapaian tujuan sebagai pengembangan diri. Ada enam hal yang terkait dengan pemberdayaan ini, yaitu:

1. *Learning by doing*, artinya pemberdayaan adalah proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus dampaknya dapat terlihat
2. *Problem solving*, yang berarti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self evaluation* yaitu mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri
4. *Self development and coordination* artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self selection* artinya suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan
6. *Self decisim* yaitu memilih tindakan yang tepat dan memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri

Pahmi (2010: 89-93) memberikan contoh program pemberdayaan masyarakat desa pada era reformasi dapat dilihat pada program pemberdayaan masyarakat desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Alokasi Dana Desa dilaksanakan pada tahun 2006 memerlukan

kebijakan pemberdayaan. Untuk itu pemberdayaan desa yang tertuang dalam ADD perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu

1. Fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi melalui media desa maupun forum rembuk desa
2. Fasilitas untuk pemetaan kebutuhan desa, permasalahan, potensi desa melalui inventarisir data maupun hasil kerja keliling dan rembuk desa
3. Mengembangkan fasilitas penggalangan dan untuk mendukung program-program pemberdayaan desa
4. Memfasilitasi pemahaman dan kemitraan dengan pemerintah desa
5. Memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesaan
6. Membuat media warga sebagai media akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan dan penggunaan anggaran desa
7. Memanfaatkan potensi desa, mengelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan

Upaya-upaya pemberdayaan dilakukan secara seksama dan terus-menerus, maka ADD dapat menolong masyarakat desa dari

kungkungan kemiskinan, sebab ADD membawa banyak manfaat bagi kehidupan desa. Dengan adanya lokasi dana ke desa perencanaan yang berpartisipasi akan lebih berkelanjutan karena masyarakat secara langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam perencanaan desa.

Adapun manfaat dari alokasi dana ke desa adalah ; 1) masyarakat desa lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat berpeluang besar terakomodir, karena pengambilan kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat; 2) Pelaksanaan pembangunan di desa lebih maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat; dan 3) Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Program PNPM merupakan proyek dari Bank Dunia yang telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini dimulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik.

PNPM mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/ sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM mandiri tahun 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dana yang dibutuhkan adalah antara 250 juta sampai 3 miliar perkecamatan atau tergantung pada jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Program ini merupakan sistem pembangunan *bottom up planning*, seluruh kegiatan diusulkan langsung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat desa sama-sama terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan penggunaan dana.

e. Teori Pengembangan Desa

Pahmi Sy (2010 : 11-18) menjelaskan beberapa teori dalam pembangunan desa. Teori pembangunan muncul setelah melihat fenomena kemiskinan berlangsung di dunia ketiga atau negara-negara berkembang.

1. Teori Modernisasi

- Teori Harrol-Domar : Tabungan dan Investasi Teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan

dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga rendah. Teori ini berasumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah investasi modal.

- Max Weber : Etika Protestan

Etika protestan mengisyaratkan penganut agama Protestan Calvin untuk bekerja keras meraih sukses bekerja tanpa pamrih bukan untuk mencari kekayaan material, melainkan untuk mengatasi kecemasannya. Etika ini menjadi sebuah nilai tentang kerja keras tanpa pamrih untuk mencapai sukses. Ia bisa saja berada di luar agama protestan menjadi nilai-nilai budaya di luar agama.

- David McClelland : Dorongan Berprestasi atau n-Ach

Seorang dengan n-Ach yang tinggi memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tidak sekedar untuk meraih imbalan dan hasil kerjanya, namun ada kepuasan batin tersendiri kalau dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna.

- W. W Rostow : Lima Tahap Pembangunan

Rostow menganggap bahwa proses pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam garis lurus yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Ada lima tahap untuk mencapai kemajuan tersebut.

a. Masyarakat tradisional. Masyarakat ini belum memiliki pengetahuan yang memadai dan masih tergantung pada alam (tidak bisa menguasai alam) serta percaya kekuatan-kekuatan di luar manusia. Kemajuan berjalan sangat lambat

b. Prakondisi untuk lepas landas. Kondisi ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar atau masyarakat yang lebih maju, karena itu masyarakat tradisional tidak mampu mengubah dirinya tanpa campur tangan dari luar. Periode ini usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat untuk usaha-usaha produktif.

c. Lepas landas. Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Periode

ini tabungan meningkat dan dalam usaha pertanian ditandai dengan tumbuhnya teknik-teknik baru sehingga pertanian menjadi usaha komersil untuk mencari keuntungan.

d. Bergerak ke dewasa. Ditandai berputarnya investasi supaya bisa mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk. Industri berkembang dengan pesat. Negara memantapkan posisinya di perekonomian global, dan berorientasi pada ekspor

e. Zaman konsumsi massal yang tinggi. Periode ini terjadi kenaikan pendapatan masyarakat tidak lagi pada kebutuhan pokok tetapi meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Negara sudah menyediakan dana kesejahteraan sosial dan pembangunan berjalan secara terus-menerus.

- Bert F. Hoselitz : Faktor-faktor Non-Ekonomi

Fakultas non ekonomi yang dimaksudkan Hoselitz adalah kondisi lingkungan, seperti keterampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh, administrator yang profesional, ahli ilmu pengetahuan dan tenaga manajerial yang tangguh.

- Alex Inkeles dan David H. Smith : Manusia Modern

Manusia modern memiliki ciri-ciri, yaitu terbuka terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, dan percaya bahwa manusia bisa berubah menjadi modern melalui pendidikan dan pengalaman. Proses pendidikan yang terus menerus dan pengalaman kerja di tempat-tempat modern membuat manusia lambat laun menjadi modern.

2. Teori Struktural

- Raul Prebich : Industri Substitusi Impor

Teori pembagian kerja secara internasional didasarkan pada teori keunggulan komparatif membuat Negara-negara di dunia melakukan spesialisasi produksi. Dengan demikian Negara terdapat dua kelompok, yaitu Negara-negara pusat yang menghasilkan barang-barang industri dan negara-negara pinggiran yang memproduksi hasil pertanian. Menurut Prebich, daya tukar barang-barang hasil pertanian rendah

dibandingkan dengan hasil-hasil industri. Akibatnya terjadi defisit pada neraca perdagangan Negara-negara pinggiran. Prebich menganjurkan agar Negara-negara pertanian melakukan industrialisasi keterbelakangannya dimulai dengan industri substitusi impor.

- Perdebatan tentang Imperialisme dan Kolonialisme

Ada tiga kelompok teori :

- a. Teori God. Kelompok teori yang menekankan idealism manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
- b. Teori Glory. Kelompok teori yang menekankan kehausan manusia terhadap kekuasaan untuk kebersaran pribadi maupun kebesarannya masyarakat dan negaranya.
- c. Teori Gold. Kelompok teori yang menekankan keserakahan manusia yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan yang dikuasi oleh kepentingan ekonomi.

- Paul Baran : Sentuhan yang mematikan dan Kretinisme

Menurut Baran Negara pinggiran yang dsentuh Negara maju tidak mengalami kemajuan. Kapitalisme muncul di Negara pinggiran berbentuk penyakit kretinisme.

f. Ketahanan Pangan Isu Pokok Abad ke 21

Soetrisno (1999) menjelaskan bahwa pada abad ke 21 sering disebut sebagai era globlisasi yang tidak akan memberikan banyak harapan bagi para petani di Negara-negara berkembang, termasuk petani-petani di Indonesia yang umumnya adalah petani subsisten. Salah satu masalah penting adalah bagaimana mempertahankan kemampuan petani menjamin ketahanan pangan bagi mereka sendiri dan bangsanya. Jika petani tidak mampu mempertahankan ketahanan pangan berarti Negara harus menggantungkan kebutuhan pangan pada perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor produksi pangan.

Adanya kebijakan WTO tentang *Trade Related Intellectual Right* dan kebijakan lain telah merusak ketahanan ekologis sistem pertanian, karena mendorong terciptanya konsentrasi pemilikan sumber daya alam dengan cara menghilangkan batasan pemilikan terhadap sumber alam (tanah, air, dan keanekaragaman hayati). Kehadiran perkebunan besar menguasai tanaman yang hanya ditanami satu jenis saja sehingga

melemahkan keragaman hayati suatu daerah dan menyebabkan adanya serangan hama. Liberalisasi perdagangan menutup akses para petani terhadap bibit sebagai sarana produksi usaha tani mereka. Negara anggota WTO membuka pasaran pabrik bibit luar negeri sehingga terjadi monopoli perdagangan bibit oleh perusahaan trans-nasional. Terlebih lagi bila adanya monopoli pupuk, pestisida dan herbisida. Selain bibit, petani juga membutuhkan pupuk dan obat-obatan pelindung tanaman. Akhir November 1998, pemerintah Indonesia menghapus kebijakan pupuk murah dan menyerahkan pada mekanisme pasar, sehingga muncul berbagai protes dan kerusuhan.

Pertanian organik dapat menjadi pertanian alternatif dengan mengurangi pemakaian saprodi kimiawi. Selain itu, menanam kembali bibit padi lokal ternyata memberikan produksi yang cukup memadai dan cukup memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit.

Kesadaran pentingnya pengembangan pertanian organik muncul di Negara-negara Asia tenggara selain Indonesia, terutama Thailand dan Philipina. Jaringan antar LSM di Asia juga memiliki program pengembangan pertanian organik melalui organisasi bernama ANGO (*Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development*). Program organisasi ini juga melakukan advokasi pentingnya hak-hak petani atas air dan bibit bagi ketahanan pangan masyarakat.

ANGOC melakukan advokasi menentang patenisasi bibit dan penemuan teknologi pertanian lain oleh perusahaan trans-nasional. Namun, kelemahannya adalah belum ada upaya sepenuhnya dari pihak pemrakarsa pertanian organic untuk memasarjab program mereka kalangan konsumen dalam negeri. Ini sangat penting karena menyangkut kesehatan manusia. Dengan demikian, untuk meningkatkan kehidupan petani, tidak hanya diperlukan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan produktifitas petani, namun harus diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani.

Dengan kata lain, suatu sistem pertanian yang berkelanjutan harus didukung oleh sebuah organisasi petani yang mandiri dan mempunyai kekuatan politik yang dapat memperjuangkan aspirasi kaum petani. Ini berarti, pembangunan pertanian harus mengemban misi demokratisasi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi nasional umumnya dan tingkat pertanian masyarakat khususnya. Land reform juga bagian integral dari suatu model pembangunan pertanian abad ke 21.

C. Rangkuman

1. Strategi pembangunan desa terdiri dari : a) pembangunan pertanian, yaitu memperbaiki kondisi masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan masyarakat. b) industrialisasi, yaitu mengembangkan industri kecil dan kerajinan. c) pembangunan masyarakat terpadu, yaitu gabungan pendekatan top down dengan bottom up; d) pusat pertumbuhan, yaitu alternatif untuk mengembangkan sebuah pasar dekat desa. e) pembangunan berparadigma ganda, yaitu strategi gotong royong, teknikal profesional, konflik dan pembelotan cultural
2. Model-model pembangunan desa adalah: a) pendekatan modernisasi yang berdampak terhadap system social dan struktur social masyarakat dari tradisional ke modern. B) *community development*, yaitu usaha swadaya masyarakat dengan usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, budaya dan ekonomi dan memberi kesempatan masyarakat untuk memajukan kehidupannya. C) partisipatif, yaitu pemeran utama adalah masyarakat itu sendiri dan menganggap masyarakat mengetahui apa yang mereka butuhkan dan baik bagi mereka. d) pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri apa menjadi pilihannya.

3. Teori pembangunan desa terdiri dari teori modernisasi dan struktural
4. Isu pokok pembangunan pertanian abad ke 21 adalah ketahanan pangan

D. Pertanyaan

1. Jelaskan beberapa strategi pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat desa !
2. Jelaskan perbedaan model pembangunan partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat di pedesaan serta berikan contohnya !
3. Jelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya modernisasi di pedesaan, berikan penjelasan anda dalam satu kasus !

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiti. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bintarto.1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta; Ghalia Indonesia
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts?*. Journal : *Environtment and Urbanization* Vol 7. No. 1 1995
- Dewey. 1987. *Capital, Credit and Saving in Javanese Marketing*
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Eviota, EU. 1992. *The Political Economy of Gender : Woman and the Sexual Division of Labour in the Philipines*. New Jersey-USA : Zed Books
- Friedmann. J.1992. *Empowerment : The Politic of Alternative Development* Cambridge : Blackwell & Oxford. United Kingdom
- Galeski Baguslow (1972). *Conflict and Change as An Aspect of Development*. London : Free Press
- Glen. 1993. *The Non Directive Approach in Community Development Methode*. London : Oxford University Press.
- Giddens, Antony. 1990 . *The Consequences of Modernity*. London : UK Polity Press
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Jeffrey. D, Brewer. 1985. *Penggunaan Tanah Tradisional dan Kebijaksanaan Pemerintah di Bima, Sumbawa timur (hal 163- 188)*. Dalam : Michael R.

- Dove (editor) 1985. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Leibo SU, Jefta. 1995. Sosiologi Pedesaan : Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda. Yogyakarta : Andi Offset.
- Loekman Sutrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta : Kanisius.
- Marzali, Amri. Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia. Jurnal Antropologi No. 54. Jakarta : UI Press
- Popkin, Samuel L. 1986. Petani Rasional. Jakarta : Yayasan Padamu Negeri
- Penny, David H. 1984. Hints for Research Workers in Social Sciences (Revised Edition). New York : Centre of International Studies and Departemen Of Agricultural Economics Cornell University. Ithaca.
- Prasodjo, N. 1993. Pola Kerja Rumah Tangga Miskin Pada Musim Paceklik. Studi perbandingan pada Komunitas Nelayan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Astanajapura. Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Tesis Pascasarjana Bogor : IPB
- Polanyi, Karl 1988. Ekonomi Sebagai Proses Sosial. Dalam Hans Dieters Evers Teori Masyarakat : Proses Peradaban Dalam Sistem Dunia Moder. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Priyono. 1996. Organisasi Non Pemerintah (NGOS) : Peran dan pemberdayannya. Jakrta : CSIS.
- Pahmi Sy. 2010. Persoektif Baru Antropologi Pedesaan. Jakarta : Gaung Persada. Press
- Rogers, Everet M. dan F.F. Shoemaker. 1987. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Surabaya : Usaha Nasional

- Restu.1992. Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Wilayah Pedesaan Kabupaten Deli Serdang Sekitar Kotamadya Medan. Program Pascasarjana Bogor : IPB
- Rizal, Ar. 2003. Krisis Kepemimpinan di Minangkabau. Artikel. 18 Mei 2003. Padang ; Singgalang
- Scott, James C. 1989. Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta : LP3ES
- Sayogyo dan Pujiwati Sayogyo. 1996. Sosiologi Pedesaan : Kumpulan Bacaan Julid 1. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soedjono. 1982. Pengantar Sosiologi. Jakarta : LP3ES
- Sunanto, Hatta dkk. 2000. Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat : Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa. Bandung : Mandar Maju.
- Soetrisno, Loekman. 1999. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Subah Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Kanisius
- Sayogyo.1978. Lapisan Masyarakat Paling Bawah di Pedesaan. Prisma Juni No.3. Jakarta : LP3ES
- Sumitro.1996. Pola-pola Pencaharian Nafkah Ganda di Pedesaan. Studi Kasus Perubahan Pola Pencaharian Nafkah pada Suatu Desa di Jawa Barat. Disertasi Pascasarjana. Bogor : IPB.

- Saptari, Ratna dan B. Holzner. 1997. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta : Grafiti
- Sumardjo. 1988. Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga di Pedesaan Jawa. Studi Kasus Penerapan Intensifikasi Tembakau pada Desa di Lingkungan Perkebunan Besar di Lingkungan Perkebunan Besar di Kabupaten Klaten. Tesis. Pascasarjana Bogor : IPB
- Suwarsono dan Alvin Y. SO. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta : LP3ES
- Tjondonegoro, MP. 1999 . Memudarnya Otonomi Desa (hal 15-25). Dalam : Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Uphoff dan Cohe. 1997. Rural Development Participation Measures For Projects design implementation and Evaluation. Monograph Series No 2. Comel University : Rural Development Commite Centre For International Studies.
- Van Bemmelen. 1995. Jender dan Pembangunan : Apakah yang Baru ? Dalam TO. Ihromi (Ed). Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta : Obor.
- Wolf, Erich R.1985. Petani Suatu Tinjauan Antropologis : Jakarta : Rajawali
- Widiyanto. 2010. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan Kasus Komunitas Petani Tembakau di Lereng Gunung Sumbing Sindoro. Surakarta : LPP UNS dan UNS Press

SENARAI

1. *Bawon* adalah bagian hasil yang diberikan kepada tenaga kerja penuai padi sebagai upahnya yang didasarkan atas prestasi kerja di penuai padi masing-masing. Jumlahnya berkisar seperempat sampai sepersembilan, tetapi menurut tradisi yang paling umum adalah seperenam bagian dari hasil (di Jawa).
2. *Ceblokan* adalah suatu sistem kerja kontrak dengan bayaran upah sesuai dengan jumlah kerjanya dalam memanen, menanam dan menyang (di Jawa)
3. Diferensiasi sosial adalah diferensiasisi pekerjaan, peranan, prestise, kekuasaan dan kelompok dalam masyarakat, yang sesuai dengan fungsinya
4. Diferensiasi struktural adalah proses spesialisasi fungsional dari struktur-struktur
5. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif
6. Fatalisme adalah suatu gagasan yang beranggapan bahwa pengendalian dari luar terhadap kegiatan maupun perencanaan yang dilakukan oleh manusia, sama sekali tidak ada
7. Foklore adalah kepercayaan, mite, cerita-cerita maupun tradisi yang masih berlaku dalam suatu masyarakat atau bagian masyarakat (cerita rakyat)

8. *Gama* adalah kontak kerja yang memberikan suatu hak panen yang eksklusif untuk bagian hasil yang sama kepada pekerja yang melakukan penyiangan tanpa menerima upah (di Jawa)
9. *Hunusan* adalah kontrak kerja secara tradisional dimana semua penduduk desa dalam panen dan perontokan dan yang melakukan panen itu menerima bagian tertentu dari hasilnya (di Jawa)
10. *Hacienda* adalah tanah-tanah usaha raksasa di Philipina dari ratusan sampai ribuan hektar yang berasal dari hibah kerajaan dan pembelian tanah milik kerajaan yang tidak diusahakan.
11. Mobilitas sosial adalah gerak dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya
12. *Mode produksi* adalah cara-cara memproduksi suatu masyarakat, misalnya pertanian dan sebagainya.
13. Polarisasi adalah suatu proses terkutubnya masyarakat menjadi hanya (dua) lapisan yaitu lapisan petani luas komersial yang kaya dan lapisan buruh tani tunakisma yang miskin.
14. Ritus kolektif adalah upacara-upacara yang dilakukan secara bersama-sama (kelompok)



Riwayat Singkat

Nora Susilawati adalah Dosen di Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Menamatkan S1 di Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang tahun 1997, lalu melanjutkan S2 di Program Studi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor tamatan tahun 2002. Beliau kini dipercaya sebagai Ketua Jurusan Sosiologi hingga tahun 2019 nanti. Selain itu beliau juga aktif di Pusat Studi Etnisitas dan Konflik (CETCOS) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sejak tahun 2006 hingga saat ini